

**LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
PROVINSI GORONTALO**

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



**SEKRETARIAT SDGS PROVINSI GORONTALO
DESEMBER 2019**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang implementasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia. Dalam Peraturan tersebut, Presiden mengamanatkan untuk tingkat provinsi memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Republik Indonesia. Hal ini penting dilakukan karena Indonesia adalah salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang turut aktif mendorong penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Indonesia sendiri telah membuat Peta Jalan (*Road Map*) Nasional TPB yang berisi dokumen rencana kebijakan strategis tahapan-tahapan pencapaian TPB tahun 2017 sampai tahun 2030 sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Adapun dalam TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak bisa mendukung pencapaian TPB sesuai dengan sasaran pembangunan baik di daerah maupun secara nasional.

Tahun 2018 Provinsi Gorontalo mulai melakukan penyelarasan antara indikator SDGs dengan indikator pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 7 tahun 2018 yang mengharuskan adanya analisis pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, sehingga penting bagi daerah untuk menyelaraskan indikator SDGs kedalam indikator RPJMD di masing-masing daerah. Hal ini merupakan kontribusi positif dan keterlibatan secara langsung Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pencapaian TPB/SDGs Indonesia maupun sebagai bagian dari komunitas dunia global.

Namun sampai Juni 2019, implementasi terhadap pencapaian target dan tujuan SDGs di Provinsi Gorontalo masih sangat rendah. Beberapa target/indikator dan tujuan masih belum tercapai, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk dapat mencapainya. Juga penting membangun koordinasi terus menerus dan pelibatan semua pihak baik pemerintah (instansi atau OPD terkait), ormas, akademisi, media, dan sektor swasta yang ada di daerah untuk bersinergi memaksimalkan kinerja sesuai peran dan fungsinya guna mewujudkan berbagai target capaian pada TPB/SDGs tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penting melakukan analisis matriks target dan capaian berdasarkan evaluasi RENSTRA dan RENJA tahun 2018 masing-masing OPD terkait, sebagai bahan evaluasi pencapaian SDGs Provinsi Gorontalo tahun 2019. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan acuan untuk perencanaan yang ditargetkan pada tahun 2019 – 2022 mendatang.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi target pencapaian SDGs Provinsi Gorontalo tahun 2019.

1.3 Luaran

Output yang diharapkan adalah diperoleh laporan perkembangan target capaian SDGs Provinsi Gorontalo tahun 2019.

BAB 2

RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS



TUJUAN 1. Tanpa Kemiskinan

Dalam lima tahun terakhir, secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tingkat keberhasilan Provinsi Gorontalo dalam upaya pencapaian target SDGs **Tujuan 1** digambarkan melalui penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di tahun 2019. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Gorontalo yang menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2019 sebesar 15.31 persen, sedangkan pada Maret 2019 tercatat 15.52 persen. Artinya, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0.21 persen. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2019 tercatat 184.71 ribu jiwa, lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebanyak 186.03 ribu jiwa. Disamping itu, kualitas SDM Provinsi Gorontalo mengalami kemajuan yang cukup pesat. Capaian IPM di Provinsi Gorontalo secara garis besar meningkat rata-rata sebesar 0.70 pada periode 2016-2019. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Gorontalo mencapai 68.49, meningkat 0.78 dibandingkan dengan capaian IPM pada tahun 2018 sebesar 67.71. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari intervensi berbagai program pro-rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang bersinergi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota.

TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
Target 1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	17.72	PM	15.31	
		RPJMD	%	17.63	16.09		
Target 1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Renstra Kemenkes dan Renstra Dinkes	%	80.25	84.00		
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	12,208	24,254		
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial dan P3A	Jiwa	215	350		
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial dan P3A	RTM	30,495	80,000		
Target 1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	79.96	PM	88.65	
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	172.22	177		
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Renstra Kemenkes dan Renstra Dinkes	%	84.34	< 95		
		BPS	%	51.32 (2017)	PM	64.33	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	207.89	158.9		

TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
	berstatus kawin.	Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 2018-2019: Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	68.20	61.3		
		BPS	%	68.96 (2017)	PM	69.74	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	BPS	%	39.98	PM	94.19	
		RPJMD	%	71.59	77.09	86.43	
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	130.4	152.7		
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	BPS	%	59.19	PM	74.57	
		RPJMD	%	59.85	64.45	76.71	
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	129.46	143		
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	BPS	%	20.14*	PM	14.16	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	BPS	%	97.23	PM	98.25	
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	97.00	97.15		
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	92.25	94.03		
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	88.68	93.01		
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo Utara	%	100	PM		
	Kab. Gorontalo	RPJMD Kab. Gorontalo	%	99.62	99.77		
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota	%	95.25	99.00		

TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
		Gorontalo					
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	BPS	%	68.89	PM	66.84	
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	78.10	79.67		
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	77.23	81.00		
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	54.61	61.49		
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo Utara	%	80.62	PM		
	Kab. Gorontalo	RPJMD Kab. Gorontalo	%	74.55	80.13		
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	87.43	94.00		
1.4.1.(i)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	BPS	%	143.63	PM	52.20	
		RPJMD	%	76.13	76.88	78.75	
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	BPS	%	86.33	PM	90.44	
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Proposal Pemohon	Unit (Listrik PLN)	34.036	PM		
		Proposal Pemohon	Unit (Listrik Bukan PLN)	88	PM		
		BPS	%	94.8 (2017)	PM	97.65	
Target 1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						

TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
	Kab. Pohnomo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Orang	5500	2500		
	Kab. Boalemo			7500	4500		
	Kab. Bone Bolango			2500	1500		
	Kab. Gorontalo Utara			3500	2500		
	Kota Gorontalo			3500	2500		
	Kab. Gorontalo			7000	4500		
	1.5.1.(a)			Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.			
Kab. Pohnomo		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Desa	44	10		
Kab. Boalemo				45	20		
Kab. Bone Bolango				74	50		
Kab. Gorontalo Utara				74	50		
Kab. Gorontalo				74	50		
Kota Gorontalo				Kelurahan	17	8	
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.						
	Kab. Pohnomo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	%	30	50		
	Kab. Boalemo			60	85		
	Kab. Bone Bolango			30	50		
	Kab. Gorontalo Utara			30	50		
	Kab. Gorontalo			30	50		
	Kota Gorontalo			30	50		
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.						
	Kab. Pohnomo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Jiwa/KK	Nihil	Nihil		
	Kab. Boalemo			1	1		
	Kab. Bone Bolango			Nihil	Nihil		
	Kab. Gorontalo Utara			Nihil	Nihil		
	Kab. Gorontalo			Nihil	Nihil		
	Kota Gorontalo			Nihil	Nihil		
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.						

TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Kec	4	2		
	Kab. Boalemo			3	2		
	Kab. Bone Bolango			1	1		
	Kab. Gorontalo Utara			1	1		
	Kota Gorontalo			1	1		
	Kab. Gorontalo			1	1		
	1.5.1.(e)			Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi.			
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Kec	1	1		
	Kab. Boalemo			1	1		
	Kab. Bone Bolango			1	1		
	Kab. Gorontalo Utara			1	1		
	Kota Gorontalo			1	1		
	Kab. Gorontalo			1	1		
	1.5.2. (a)			Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.			
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Milyar Rupiah	15	15		
	Kab. Boalemo			25	13		
	Kab. Bone Bolango			15	15		
	Kab. Gorontalo Utara			15	15		
	Kota Gorontalo			15	15		
	Kab. Gorontalo			15	15		
	1.5.3*			Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Dokumen	1 (Belum diperbaha rui)	1		
	Kab. Boalemo				1		
	Kab. Bone Bolango				1		
	Kab. Gorontalo Utara				1		
	Kab. Gorontalo				1		
	Kota Gorontalo				1		

TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
Target 1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.						
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	-	Rupiah	PM	PM		
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	RPJMD	Rupiah, Fungsi Pendidikan	86,535 milyar	111,477,373,151		
			Rupiah, Fungsi Kesehatan	67,425 milyar	118,239,704,258		
			Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial	6,992 milyar	56,226,004,194		



TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang mendorong pencapaian SDGs **Tujuan 2** serta percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan *stunting* di wilayah rentan rawan pangan. Data 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Provinsi Gorontalo mengalami penurunan secara konsistensetiap tahunnya. Angka PoU Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 sebesar 9.87 persen turun menjadi 7.81 persen di tahun 2019. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari juga mengalami penurunan yang signifikan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 5.32 persen. Artinya, penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat aktif semakin berkurang. Disamping itu, Provinsi Gorontalo memiliki capaian skor PPH yang cukup baik yaitu diatas 89%berdasarkan hasil evaluasi program ketersediaan pangan di tahun 2019. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu 81.2% untuk tahun yang sama.Adapun indikator*stunting*dan kekurangan gizimasih perlu menjadi perhatian pemerintah karena menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Gorontalo tahun 2018 mengalami peningkatan 0.8 persen dari tahun sebelumnya.Bagitu pula dengan prevalensi kekurangan gizi pada balita (0-59 bulan) mengalami peningkatan sebesar 2.6 persen. Kondisi ini patut menjadi perhatian karena balita/baduta yang mengalami *stunting* dan kurang gizi akan rentan terhadap penyakit, menurun tingkat produktivitasnya dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

TUJUAN 2 Tanpa Kelaparan							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
Target 2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pangan	%	PM	PM		
		Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian	%	12.19	PM	7.81	
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	15.6	14.33		
		BPS	%	22.31	PM	26.1 (2018)	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pangan	%	PM	PM		
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Pangan	%	PM	PM		
		BPS		12.19	PM	5.32	
Target 2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	21.10	19.55		
	(Pendek)	BPS	%	21.5	PM	19.8 (2018)	
	(Sangat Pendek)			11.54	PM	12.7 (2018)	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	14.4	12.20		
	(Pendek)	BPS	%	15.85	PM	16.8 (2017)	

TUJUAN 2 Tanpa Kelaparan							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
	(Sangat Pendek)			8.76	PM	7.3 (2017)	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	12.10	11.08		
		BPS	%	17.79	PM	19.3 (2018)	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	3.6	3.30		
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	40.3	55.15		
		BPS	%	PM	PM	50.98	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	RPJMD	Skor	76.3	81.2	89.3	
Target 2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.						
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	Rupiah/ tenaga kerja	70,466	PM	84,588 (2018)	
Target 2.5	Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.						
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Renstra Dinas Pertanian Provinsi	Varietas/ Bibit	4 (3 tanaman & 1 hewan)	1		

TUJUAN 2 Tanpa Kelaparan							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	PKH Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI	Ternak	3 (Tidak berisiko: Ayam, Kambing, Sapi)	3		



TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Salah satu target yang harus dipenuhi dalam upaya pencapaian SDGs **Tujuan 3** adalah peningkatan kesehatan keluarga yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia karena merupakan kelompok yang rentan. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Gorontalo selama 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, tercatat sebesar 178.9 AKI per 100.000 KH, meningkat dari tahun 2018 dengan jumlah AKI sebesar 138.3 per 100.000 KH. Disisi lain, AKBa dan AKB di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan setiap tahunnya. Capaian AKBa pada tahun 2019 adalah 11.4 per 1.000 KH, lebih rendah dari target SDGs yaitu 25 per 1.000 KH. Begitu pula dengan AKB, capaian pada tahun 2019 sebesar 10.8 per 1.000 KH, lebih rendah dari target SDGs yaitu 23 per 1.000 KH. Dalam kaitannya dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam menolong persalinan dan fasilitas kesehatan yang memadai, data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo telah ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Hal ini terlihat dari persentase PKK usia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2019 mencapai angka 97.68 persen. Sedangkan cakupan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan juga mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 88.65 persen.

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
Target 3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Kematian per 100.000 KH	249.1	210.7	178.9	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	96.8	97.5		
		BPS	%	95.72 (2017)	PM	97.68	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS	%	79.96	PM	88.65	
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	172.22	177		
Target 3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Ribu Jiwa	12.5	11.8	11.4	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Ribu Jiwa	9.5	8.8		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Ribu Jiwa	11.2	10.6	10.8	
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	94	97		
		BPS	%	66.67	PM	66.67 (2018)	
Target 3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	<0.05	0.0129	

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	Insiden per 100.000 pddk	210	205	230	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	API per 1000 orang	PM	PM		
		BPS		0.15	PM	0.05 (2018)	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Jumlah Kab/Kota	6	6		
		BPS	Kab/Kota	2	PM	2 (2018)	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	PM		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Jiwa	PM	PM		
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Provinsi	PM	PM		
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Kab/ Kota	PM	PM		
		BPS	Kab/Kota	4 (2017)	PM	4 (2018)	
Target 3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	7.2	3.6		
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	31.7	15.9	29.64	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	21.8	10.9	36.64	

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Kepolisian Daerah Gorontalo	Kematian/ 100.000 pddk	10	PM		
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	Kab/Kota	6	6	6	
Target 3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.						
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNNP Provinsi Gorontalo	Orang	115	132		
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	BNNP Provinsi Gorontalo	Orang	80	120		
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial dan P3A	Jiwa	26	30		
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	BNNP Provinsi Gorontalo	Lembaga	2	5		
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNNP Provinsi Gorontalo	%	2.15	PM		
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BNNP Provinsi Gorontalo	-	n.a	n.a		
		BPS	%	0.33	PM		
Target 3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN (Dinas Kesehatan)	%	PM	PM		
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	207.89	158.9		

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
	tahun yang berstatus kawin.	2016 : Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 2018-2019 : Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	68.2	61.3		
		BPS	%	68.96 (2017)	PM	69.74	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	BKKBN (Dinas Kesehatan)	%	50.5	55.3		
		2016 : Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 2018-2019 : Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	25.5	23.5		
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Kelahiran per 1.000 perempuan umur 14-19 tahun	PM	PM		
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	RPJMD	Jumlah anak per WUS 15-49 thn	2.6	2.5	2.5	
Target 3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	PM		

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
		BPS	%	8.81 (2017)	PM	7.89	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	RPJMD	Juta Jiwa	219,249	205,584	414,494	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Renstra Kemenkes dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	80.25	84.00		
Target 3.9	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	PM		
Target 3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	27.26	PM		
Target 3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	75	100	95.92	
Target 3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dokter umum / 1.000 penduduk	0.18	PM	0.392 (BPS)	

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
		Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dokter spesialis / 1.000 penduduk	0.11	PM		
		Dinas Kesehatan Kab/Kota	Bidan / 1.000 penduduk	0.77	PM	1.447 (BPS)	



TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas

Sampai dengan tahun 2019, Provinsi Gorontalo menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam pencapaian target SDGs **Tujuan 4** urusan pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kemajuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. APK PAUD/KB mengalami peningkatan dari 48.54 persen di tahun 2017 menjadi 49.49 persen di tahun 2019. Pada jenjang pendidikan dasar, APK SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 adalah sebesar 110.88 persen, sedikit lebih rendah dari APK di tahun 2018. APK SMP/MTs/ sederajat juga mengalami penurunan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 78.95 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan APK sebesar 80.17 persen. APK SMA/MA/ sederajat secara konsisten mengalami peningkatan sebesar 3.5 persen dalam tiga tahun terakhir (2017-2019). Disamping capaian APK, kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo diukur pula dengan indikator angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka RLS mengalami peningkatan dari 7.83 di tahun 2018 menjadi 8.11 di tahun 2019, artinya rata-rata masyarakat Provinsi Gorontalo mengenyam pendidikan sampai pada jenjang SMP Kelas 2. Capaian ini didukung pula dengan peningkatan kemampuan dasar masyarakat dalam menulis dan membaca yang diukur melalui angka melek aksara dengan capaian diatas 99 persen pada tahun 2019. Dalam kaitannya dengan prinsip pengarusutamaan gender, kesetaraan gender pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Gorontalo telah berhasil diwujudkan. Hal ini dibuktikan dari rasio APM di semua jenjang pendidikan yang mencapai 100 persen.

TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
Target 4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	n.a	n.a		
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.						
	Kab. Pohuwato	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	67	63		
	Kab. Boalemo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	59.7	69.7		
	Kab. Bone Bolango	Profil Pendidikan	%	85.71	83.44		
	Kab. Gorontalo Utara	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	91.37	93.53		
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	56.19		
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	PM	95		
	MI	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	97.02		
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B						
	Kab. Pohuwato	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	47		
	Kab. Boalemo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	58.73	68.73		
	Kab. Bone Bolango	Profil Pendidikan	%	71.43	76.64		
	Kab. Gorontalo Utara	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	88.89	92.59		

TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	68.99		
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	PM	95		
	MTs	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	102.612		
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	9.50	25.22		
	MA	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	102.44		
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS	%	108.34	PM	110.88	
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	105.1	103.45		
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	96.04	97.01		
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	105.09	113.03		
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo Utara	%	113.42	PM		
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	116.47		
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	114.34	120		
	MI	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	10.26		
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	BPS	%	83.71	PM	78.95	
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	102.18	101.10		

TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	97.73	98.95		
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	83.08	87.97		
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo Utara	%	101.24	PM		
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	107.49		
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	115.19	120		
	MTs	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	23.172		
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	88.67	PM	88.64	
		RPJMD		93.07 (2017)	94.12	98.27	
	MA	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo		PM	10.572		
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	Tahun	7.12	7.35	8.11	
		BPS		7.77 (2017)	PM	8.11	
Tabel 4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS	%	48.54 (2017)	PM	49.49	
	Kab. Pohuwato	Renstra Dikpora Kab. Pohuwato	%	55.56	83.25		
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab.	%	92.81	93.1		

TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	n.a	n.a		
Target 4.b	Pada tahun 2021, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.						
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	-	n.a	n.a		
Target 4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Bidang GTK (Guru dan Tenaga Pendidikan) Dikbudpora Provinsi	Orang	855 (2017)	PM		
		Bidang GTK (Guru dan Tenaga Pendidikan) Dikbudpora Provinsi	Orang	640 (2017)	PM		



TUJUAN 5. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan Provinsi Gorontalo untuk terus berkembang, mengurangi kemiskinan serta menjalankan roda pemerintahan secara lebih efektif. Capaian perbandingan antara pembangunan perempuan dan laki-laki tercermin salah satunya dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2019, IPG Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dan berada pada angka 86.83, namun capaian ini masih jauh dibawah IPG nasional dengan nilai 91.07. Pada level nasional, Provinsi Gorontalo masuk kedalam kategori provinsi dengan IPG terendah. Disamping capaian IPG, indikator kesetaraan gender dalam Tujuan 5 SDGs juga diukur melalui komposisi dan kontribusi perempuan di dunia politik. Pada periode 2019-2024, persentase anggota perempuan dalam parlemen masih belum mencapai target kuota 30 persen sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sejauh ini, Provinsi Gorontalo memiliki 1 perwakilan perempuan di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan 2 perwakilan perempuan di kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Sedangkan proporsi perempuan yang duduk di kursi DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah sebesar 20% dengan jumlah perempuan sebanyak 41 orang dari 204 anggota parlemen.

TUJUAN 5 Kesetaraan Gender							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
Target 5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Sosial P3A	Kebijakan	1	2		
Target 5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	P2TP2A	Jiwa (korban kekerasan usia 13-59 thn)	212	Menurun		
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	P2TP2A	Anak (usia 13-17 thn)	80	Menurun		
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	P2TP2A	Jiwa (korban kekerasan usia 13-59 thn)	212	Menurun		
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	P2TP2A	Jiwa Korban Kekerasan	246	Menurun		
Target 5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	BKKBN Provinsi Gorontalo	%	PM	PM		
		BPS	%	14.51 (2017)	PM	13.16	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN Provinsi Gorontalo	Tahun	PM	PM		

TUJUAN 5 Kesetaraan Gender

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2016: Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 2018-2019: Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	45.96	38		
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	88.67	PM		
		RPJMD	%	93.07 (2017)	94.12	98.27	
	MA	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	10.572		
Target 5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Setwan DPRD	Jiwa	DPR RI = 0a	0a	1	
			Jiwa	DPD RI = 1a	1a	2	
			Jiwa	DPRD Prov = 14a	14a	12	
			Jiwa	DPRD Kab/Kota = 29a	29a	29	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Renstra Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	Jiwa	Eselon I = 4a	4a		
			Jiwa	Eselon II = 4a	4a		
Target 5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.						

TUJUAN 5 Kesetaraan Gender							
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
				2016	2019		
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BKKBN Provinsi Gorontalo	%	PM	PM		
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	2016: Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 2018-2019: Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	11.6	9.91		
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	2016: Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 2018-2019: Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	16.6	70		
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Kementrian Kesehatan, BKKBN, KPPPA	Dokumen	3 (UU = 2) (PP = 1)	PM		
Target 5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	52.93	PM	60.36	



TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan (ada di Bab 3), dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Program Tujuan 6. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: **(1)Program Pengembangan Kinerja Air Minum Sanitasi,** kegiatan a) Pembangunan Prasarana Air Minum, kegiatan b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi, **(2) Program Pengendalian banjir,** kegiatan a) Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Provinsi Gorontalo, **(3) Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan,** kegiatan a) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sempadan Sungai (POKJA SADAR KONSERVASI SUNGAI) dalam mendukung Provinsi Konservasi, **(4) Program Pemanfaatan Potensial Sumberdaya Hutan,** **(5) Program Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan,** **(6) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,** kegiatan a) Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Provinsi Gorontalo, b) Kegiatan Hutan Manunggal, c) Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat.

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 TPB/SDGs disajikan pada Tabel 2.1 Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 6.

Tabel 2.1. Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 6

Nama Tujuan (1): 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
Nama Target (2): 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Tahun Dasar/ Baseline 2016 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019 (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019 (9)	Status (10)
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Renja PUPR 2019	Jiwa	19.94	3.988	0	Belum tercapai
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	BPS	%	69,91	90,92	90,92	Tercapai
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Dinas PU/PD AM	liter	976	976	0	Belum tercapai
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas Kesehatan	%	57	57	0	Belum tercapai
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan						
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	RENSTR A 2017-2022 Dinas Kesehatan	%	0.69	0.69	0	Belum tercapai
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	74.61	79.71	79.71	Tercapai
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	BPS	%	42.81	60.57	60.57	Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang	Renja Dinas Kesehatan	Σ	731	731	534	Tercapai

	melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	an 2019					
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Renja Dinas Kesehatan 2019	Σ	731	731	55	Sedikit tercapai
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	RENSTR A PU 2017-2022	Σ	3	3	0	Belum tercapai
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global						
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	RENSTR A DLHK 2017-2022	Σ	1	1	1	Tercapai
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Renja DLHK 2019	Σ	25	25	10	Sedikit tercapai
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat						
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Databas e Balai Wilayah Sungai & BMKG	Σ	n.a	n.a	n.a	n.a
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Renja DLHK 2019	komoditas	62	24	0	Belum tercapai
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Dokume n pola dan RPSDA Wilayah Sungai	Σ	n.a	3	2	Tercapai

6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	SK Gub, SK Menteri, SK Bupati	Σ	n.a	4	0	Belum tercapai
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLHK	Σ	n.a	n.a	n.a	n.a
6.6	Pada tahun 2021, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau						
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	DIPA DLHK	Σ	n.a	n.a	n.a	n.a
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	RENSTR A DLHK 2017-2022	Σ	1	1	1	Tercapai
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 %	RENSTR A DLHK 2017-2022	Σ	1	1	1	Tercapai
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	RENSTR A DLHK 2017-2022	Σ	1	1	1	Tercapai

TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua

Berdasarkan penelusuran indikator evaluasi RENSTRA dan RENJA Provinsi Gorontalo tahun 2019 pada goal 6, dari sebanyak 21 indikator hanya ada 11 indikator (52,38%) yang mencapai target, dan masih ada 10 indikator (47,62%) yang perlu dicapai pada tahun berikutnya.

Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

Pada target 6.1, dari 4 indikator baru 1 yang mencapai target SDGs yaitu persentaserumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Tahun 2018 indikator ini mencapai target 69,91% dan meningkat menjadi 90,92% pada tahun 2019. Walaupun demikian, masih ada 3 indikator yang harus dicapai pada tahun berikutnya.

Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air

besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

Pada target 6.2, dari 6 indikator 4 diantaranya mencapai target SDGs walaupun belum 100% tercapai, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target SDGs. 4 indikator yang tercapai yaitu (1) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sebesar 79,71%; (2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 60,57%; (3) jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari target 731 desa yang tercapai 534 desa (73.05%). Demikian pula dengan indikator jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) tahun 2019 capaiannya 55 desa dari 731 desa (7.52%).

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target akses terhadap sanitasi dasar antara lain: (1) Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama agar masyarakat dapat mengadopsi perilaku yang sehat dalam kehidupan sehari-hari; (2) MCK tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena masalah teknis dan kebersihan, sehingga tidak dihitung sebagai akses jamban.

Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

Pada target 6.3, kedua indikator tersebut mencapai 100% target SDGs. 1 indikator yaitu kualitas air danau Limboto sudah mencapai target 100%. Sedangkan indikator kualitas air sungai sebagai sumber air baku tahun 2019 hanya mencapai 10 dari 25 sungai (40%). Dalam hal penentuan kualitas air danau, Provinsi Gorontalo sudah melakukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemantauan kualitas air danau di Provinsi Gorontalo adalah danau Limboto.

Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat

Pada target 6.5, dari 5 indikator hanya ada 1 indikator yang mencapai target SDGs, yaitu target 6.5.1.(f) jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau, dimana kegiatannya adalah jumlah kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan sempadan sungai yang ditingkatkan kapasitasnya ada 2.

Sedangkan jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi, dari database Balai Wilayah Sungai dan Badan Meteorologi dan

Geofisika (BMKG) Provinsi Gorontalo menunjukkan dari jumlah 91 sejak 2016 sampai tahun 2019 belum ada peningkatan jumlah stasiun tersebut.

Sementara itu, untuk memulihkan kawasan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pengembangan kawasan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama air. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (2018) dan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Bone Bolango (BPDAS-HL) menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan pengembangan kawasan hutan yang semula di tahun 2018 seluas 3,950 Ha dan direncanakan bisa mencapai luasan 4,250 Ha di tahun 2021 (DLHK, 2018). Namun, sampai tahun 2019 belum mencapai target.

Wilayah Sungai memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat disekitarnya, terutama dalam bidang sosial ekonomi yang cukup luas diperuntukan bagi penyediaan Sumber Daya Air dan juga memiliki potensi geografis yang strategis untuk dikembangkan. Namun sampai tahun 2019, indikator tersebut belum tercapai.

Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau

Pada target 6.6, dari 4 indikator ada 3 indikator yang mencapai target SDGs yaitu jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya, jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%, dan jumlah danau yang menurun tingkat erosinya. Artinya ada 75% pada indikator ini yang mencapai target SDGs.

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 untuk menjamin akses terhadap energi yang terjangkau. Dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.

Mengapa SDGs tujuan 7 penting bagi pemerintah daerah ? Pemerintah daerah memiliki posisi terbaik untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan terkait akses terhadap energi yang terjangkau bagi kelompok rentan di dalam masyarakat. Pemerintah daerah dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan efisiensi energi dengan ber-investasi dalam gedung-gedung hemat energi dan sumber energi terbarukan untuk fasilitas publik. Di perkotaan, transportasi umum dan kebijakan perencanaan kota, serta teknologi 'smart city' baru dapat memberikan dampak yang signifikan bagi efisiensi energi dan emisi karbon.

Tabel . Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Kondisi 2019		
				2016	Target	Capaian	Status Capaian
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan							

modern.							
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	PLN	%	96.87	n.a		
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per Kapita	PLN	kWh	386.34	n.a	452.209	Meningkat
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Penanaman Modal-ESDM	kWh	8520	9376	n.a	



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Pemerintah daerah dapat menghasilkan pertumbuhan dan pekerjaan dari bawah melalui pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat mencegah adanya pekerja anak, dan mengupayakan agar mereka dapat mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan sektor informal untuk meningkatkan kesehatan kerja dan perlindungan sosial serta mendorong pembentukan usaha mikro, kecil dan menengah bilamana memungkinkan.

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta menjamin kesetaraan upah pekerja antar gender untuk pekerjaan yang sama. Pemerintah daerah juga dapat menyertakan praktik ini sebagai bagian dari kriteria pengadaan ketika bekerja dengan sektor swasta. Pemerintah daerah berada pada posisi yang strategis untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam menentukan biaya dan keuntungan dari pengembangan pariwisata serta mengembangkan rencana dan strategi untuk memastikan kegiatan di sektor ini berkelanjutan.

Tabel . Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Kondisi 2019		
				2016	Target	Capaian	Status Capaian
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Persen	9.81%	n.a	5,74% (ADHB)	
8.1.1 a	PDB per kapita.	BPS, Dokumen	Rupiah	27,650,000	27,820,514	34,217,140	

		RPJMD					
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	Persen	0.396	n.a	5.16 % (ADHK)	
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS (Sakernas)	Persen	8.54%	n.a	4.04%	
	Laki-Laki	BPS (Sakernas)	Persen	12.04%	n.a	3.44%	
	Perempuan	BPS (Sakernas)	Persen	3.59%	n.a	0.60%	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS (Sakernas)	Persen	80.91%	n.a	18.06%	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	bps (Sakernas)	Persen	10.56%	n.a	5.17%	
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	bps (Sakernas)	Rupiah	11694.14	n.a	n.a	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, Dokumen RPJMD	Persen	11694.14	3.65	4.06	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS	Persen	28.35%	n.a	13.10%	
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS		n.a	n.a	n.a	
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1.	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.			0	n.a	n.a	

8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	RPJMD, Renstra Dinas PM-ESDMT	Perusahaan	576	150	150	
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.						
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS dan Renstra Dispar	Orang	5923 (BPS) ; 2542 (RPJMD)	6856 (Renja Dispar)	11,173	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS dan Renstra Dispar	Orang	566394 (BPS) ; 313286 (RPJMD)	655672 (Renja Dispar)	1,304,254	
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	Jumlah kantor bank 100.000 jumlah orang dewasa.	Bank Indonesia	unit	13.89	n.a	n.a	
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	Bank Indonesia	unit	20.062	n.a	n.a	
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).				n.a	n.a	
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	KER Bank Indonesia	Persen	0.271	n.a	n.a	

9

INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia dan membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Pemerintah daerah kawasan metropolitan khususnya sangat berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang melayani kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan bisnis start-up sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal, dengan mempertimbangkan pasar, kebutuhan, dan sumber daya lokal. Pemerintah daerah dapat menemukan kesenjangan terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk menjembatannya, khususnya melalui penyediaan ruang publik seperti perpustakaan.

Tabel. Target pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Kondisi 2019		
				2016	Target	Capaian	S

							Ca
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur re dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.			n.a	n.a	n.a	
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Satker P2JN	Persen	0.94	96	96.80%	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	RPJMD	km		n.a		
9.1.2.	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Dinas Perhubungan					
	Laut		Orang	204627	n.a	155755	
	Udara		Orang	573466	n.a	495953	
9.1.2.(a)	Jumlah Bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	2	2	1	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	Unit	5	5	5	
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS (DDA)	Persen	6.58	n.a	11.62%	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS Sakernas dan DDA	Persen	16.06	n.a	10.33%	
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		Persen	0	n.a	n.a	
Target 9.c. Secara Signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan pen akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	BPS (Statistik Kesejahteraan Rakyat)	Persen	19.63	n.a	41.78%	
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS (Susenas)	Persen	52.93	n.a	60.36%	
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS (Susenas)	Persen	21.48	n.a	41.78%	

Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara Negara-negara. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dalam suatu negara. Penyaluran sumber daya kepada pemerintah daerah di kawasan-kawasan yang paling membutuhkan menjadi sangat krusial, begitu pula dengan meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dan pengasingan. Pemerintah daerah memiliki peranan khusus dalam meningkatkan inklusiftas di tingkat daerah. Pemerintah dapat mendorong partisipasi kelompok minoritas dalam proses konsultasi publik dan pemilihan umum.

Pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di dalam lembaga-lembaga dan praktik kerja pemerintahan, serta menjadikannya sebagai kriteria pengadaan barang dan jasa publik. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk tidak mendiskriminasi dalam menyediakan pelayanan umum. Pemerintah daerah dapat menerapkan pajak progresif sebagai salah satu instrumen kebijakan fskalnya dan mengalokasikan anggaran daerah untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi rumah tangga termiskin di masyarakat.

Tabel. Target Pencapaian Indikator 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Kondisi 2019		
				2016	Target	Capaian	Status Capaian
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi							
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD	Indeks	0.41	0.390	0.410	
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk yang Hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	%	17.72	16.59	15.52%	
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang ditinggal	Kementerian PDT	Kabupaten	3	n.a	3	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Dinas PMD		103	100	160 (IDM)	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Dinas PMD	Desa	3	3	3	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	BPS	Persen	6.77	n.a	n.a	
10.1.1.(f)	pesentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS	Persen	21.01	n.a	n.a	
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Indeks kebebasan sipil	BPS (statistik politik)	Indeks	82.35	n.a		
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM)	Kemenkumham	perkara	2	n.a	n.a	

10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	kemnukumham	perkara	2	n.a		
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	kemnukumham	dokumen	0	0		
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDRB			0	0	n.a	
10.4.1.(a)	persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	RPJMD	Persen	0.016511	n.a	n.a	
			Milyar	26.35	50.02	n.a	
10.4.1.(b)	proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	BPS	Persen	57%	n.a		
		RPJMD	Tenaga kerja	12208	22049		



TUJUAN 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan (ada di Bab 3), dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Program Tujuan 11. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: **(1) Program Peningkatan layanan transportasi**, kegiatan a) Pembangunan/Peningkatan Terminal Tipe B, b) Pelayanan Angkutan Perintis, c) Sosialisasi penyelenggaraan angkutan umum (termasuk penyusunan dokumen pendukung penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek), d) Pembinaan dan Penertiban e) Pengadaan Aplikasi Layanan Publik, **(2) Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi**, kegiatan a) Dukungan kelancaran transportasi, b) Koordinasi dan kerjasama pengembangan sapras perhubungan, **(3) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**, **(4)**

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, (5) Program Kedaruratan Dan Logistik, (6) Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, dan (7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 disajikan pada Tabel 2.2 Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 11.

Tabel 2.2. Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 11

Nama Tujuan (1): 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
Nama Target (2): 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Tahun Dasar/ Baselin e 2016 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019 (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019 (9)	Status (10)
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Dinas PUPR (Satker PBL)	Σ	1	1	0	Belum tercapai
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan						
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	RPJMD 2017-2022	Σ	0,54-0,88	0,48-0,83	0	Belum tercapai
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	RPJMD 2017-2022	Σ	n.a	6	0	Belum tercapai
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	RPJMD 2017-2022	ton	22880	23880	0	Belum tercapai
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas						
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Dinas PUPR (Satker PBL)	Σ	n.a	n.a	n.a	n.a
11.b	Pada tahun 2021, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini. sesuai						

	dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030						
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	RPJMD 2017-2022	Σ	5	2	1	Tercapai

TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Berdasarkan penelusuran indikator evaluasi RENSTRA dan RENJA Provinsi Gorontalo tahun 2019 pada goal 11, dari 6 (enam) indikator hanya ada 1 (satu) indikator yang mencapai target SDGs.

Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia

Pada indikator 11.4.1.(a) ini belum mencapai target SDGs, karena belum ada 1 lokasi yang dikhususkan sebagai kota pusaka di Provinsi Gorontalo, sehingga target ini belum tercapai. Namun, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Provinsi Gorontalo memiliki Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk kepentingan Sosial Budaya, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan budaya dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. KSP dari kepentingan Sosial Budaya meliputi: (1) Kota Pendidikan Gorontalo, kawasan pendidikan Kabila-Suwawa di Kabupaten Bone Bolango dan kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo; (2) Kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya Telaga-Gorontalo-Tapa.

Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

Dari 2 (dua) indikator, belum ada yang mencapai target SDGs. Berdasarkan data laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di wilayah Provinsi Gorontalo tidak terdapat Kota Tangguh Bencana. Namun untuk program pembentukan Desa Tangguh Bencana, di daerah Provinsi Gorontalo hingga tahun 2020 sudah ada 5 desa yang difasilitasi menjadi desa Tangguh bencana dari target 100 desa. Sebelumnya pada tahun 2018 dua desa yang difasilitasi menjadi desa Tangguh bencana yakni Desa Hutakalo Kecamatan Sumalata dan Desa Mokonuwu Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.

Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota

Dari 1 (satu) indikator yang ada, belum mencapai target SDGs. Padahal persoalan sampah merupakan salah satu yang sangat krusial dalam pembangunan di provinsi Gorontalo. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah provinsi Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dimana pemerintah provinsi dan

Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan dan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya di masing-masing daerah masih belum optimal, terutama pendataan jumlah sampah perkotaan yang tertangani.

Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

Dari 1 (satu) indikator yang ada, belum mencapai target SDGs, karena proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari total wilayah kota. Juga RTH di beberapa Kab/Kota masih dibawah dari 30%, seperti di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.



TUJUAN 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 2 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan (ada di Bab 3), dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Program Tujuan 12. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 disajikan pada Tabel 2.3 Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 12.

Tabel 2.3. Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 12

Nama Tujuan (1): 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Nama Target (2): 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Tahun Dasar/ Baseline 2016 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019 (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019 (9)	Status (10)
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	KLHK dalam BPS	%	82	n.a	n.a	n.a

TUJUAN 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Berdasarkan penelusuran indikator dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo pada goal 12, dari 1 (satu) indikator tersebut belum mencapai target SDGs. Data yang tersedia di DLHK Provinsi Gorontalo berdasarkan evaluasi RENSTRA dan RENJA Provinsi Gorontalo tahun 2019 hanya persentase kinerja (pembinaan dan pengawassan) pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan, yang ditargetkan 75% sudah 70% (93%) terealisasi. Artinya dari sisi kebijakan pemerintah, tujuan 12 belum terakomodir.

Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

Pada indikator 12.4.2.(a), Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, belum ada data terbaru. Pada tahun 2017, jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) yaitu 82%, namun di tahun berikutnya hingga 2019 belum ada datanya. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengelola limbah B3 belum terakomodir dengan baik.

Di Kota Gorontalo misalnya masih banyaknya penggunaan bahan kimia dalam produk-produk makanan olahan dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan dan daur ulang sampah. Selain itu, meningkatnya limbah buangan industri terutama limbah B3, dan meningkatnya jumlah sampah. Juga masih banyak perusahaan yang menerapkan sertifikat ISO 14001, serta kurangnya tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan dan kesadaran masyarakat umumnya dalam kelestarian lingkungan.

Data evaluasi RENJA DLHK Provinsi Gorontalo tahun 2019, memiliki indikator kegiatan persentase kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3

fasilitas pelayanan kesehatan, dari target 75% sudah 70%, artinya 93% terealisasi. Artinya pemerintah lebih fokus kepada pembinaan masyarakat dalam mengelola limbah yang dihasilkan, sementara penanganan dan pengelolaan jumlah limbah B3 yang dihasilkan belum menjadi prioritas.



TUJUAN 13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan (ada di Bab 3), dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Program Tujuan 13. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

- 1. Program rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan
- 2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 3. Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 disajikan pada Tabel 2.4 Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 13.

Tabel 2.4. Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 13

Nama Tujuan (1): 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
Nama Target (2): 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Tahun Dasar/ Baseline 2016 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019 (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019 (9)	Status (10)
13.2.1.(a)	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

TUJUAN 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Berdasarkan penelusuran indikator evaluasi RENSTRA dan RENJA Provinsi Gorontalo tahun 2019 pada goal 13, dari 1 (satu) indikator tersebut belum mencapai target SDGs.

Target 13.2.1.(a). Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional

Pada indikator 13.2.1.(a), adanya Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesiayang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2019 belum terealisasi, dibandingkan tahun 2018 terealisasi. Salah satu isu strategis bidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selama periode 2017-2022 adalah perubahan iklim dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini untuk menselaraskan dengan tujuan dan komitmen pemerintah untuk penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional sebesar 29% pada tahun 2030.



TUJUAN 14. Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan (ada di Bab 3), dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Program Tujuan 14. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan Persentase kawasan konservasi pesisir dan jasa kelautan yang dikelola
2. Program Pengelolaan Konservasi Rehabilitasi dan Jasa Kelautan, kegiatan Luas kawasan konservasi perairan daerah
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
4. Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-pulau Kecil, kegiatan a) Pelayanan administrasi P2SDKP kapal pengawas perikanan, b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan SD Kelautan dan Perikanan, c) Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas/speed boat pengawas
5. Penyusunan PERDA RZWP3K Provinsi Gorontalo

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 disajikan pada Tabel 2.5 Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 14. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut.

Tabel 2.5. Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 14

Nama Tujuan (1): 14. melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan							
Nama Target (2): 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Tahun Dasar/ Baseline 2016 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019 (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019 (9)	Status (10)
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Dokumen LKPJ 2019	Ha	41,610	1130	2261.27	Melebihi target pada tahun 2019
14.6	Pada tahun 2021, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization						
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Renstra 2018-2022	persen	1	0,75	0,75	Tercapai
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar						
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Renstra 2018-2022	Dok	1	1	1	Melalui PERDA RPZWP3 K dan RPZKKPD
14.b.1.(a)	Jumlah Provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Renstra 2018-2022	unit	6	6	6	Tercapai
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Laporan tahunan DKP 2016, Renstra 2018-2022	Orang	18875	n.a	n.a	n.a

TUJUAN 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
Berdasarkan penelusuran indikator evaluasi RENSTRA dan RENJA Provinsi Gorontalo tahun 2019 pada goal 14, dari 5 (lima) indikator tersebut semuanya mencapai target SDGs.

Target 14.5. Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia

Berdasarkan penelusuran dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Gorontalo tahun 2019, data jumlah luas kawasan konservasi perairan, dari target 1.130 hektar, jumlah capaian sebanyak 2.261,27 hektar, artinya luas kawasan konservasi perairan di tahun 2019 melebihi target. Pada tahun 2018 melalui dokumen Renstra 2018-2020, jumlah luas kawasan konservasi perairan dari target 11.948,7 hektar, jumlah capaian sebanyak 41.610 hektar, artinya luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Gorontalo bertambah. Namun masih diperlukan pengaturan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Target 14.6. Pada tahun 2021, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization

Pada indikator 14.6.1.(a), berdasarkan penelusuran indikator pada RENSTRA Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo, Persentase kepatuhan pelaku usaha sudah mencapai target SDGs.

Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar

Pada indikator 14.b. mencakup 3 indikator yang ketiganya jumlah capaian mencapai target SDGs. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang mengakui dan melindungi hak akses nelayan terhadap perikanan skala kecil, Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya :

1. Surat Keputusan Gubernur No. 83/24/II/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal (*Satgas Illegal Fishing*). *Satgas Illegal Fishing* dibentuk berdasarkan SK Gubernur yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Selain diisi oleh jajaran DKP, satgas juga berasal dari tim gabungan seperti Polairud Polda, Kejaksaan Tinggi dan Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalo.
2. Pergub Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Tarif Penjualan Unit Usaha Pabrik Es pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
3. Surat Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Kegiatan Seksi Sertifikasi Hak Atas Tanah

Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tingkat Provinsi Gorontalo.

4. PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (RPZKKPD).

Selain itu, peningkatan akses pendanaan usaha nelayan juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya pemberian akses ke lembaga keuangan dan perbankan bagi nelayan skala kecil dilakukan melalui pengembangan skema pinjaman kredit yang sesuai untuk nelayan skala kecil. Selain itu untuk memberdayakan nelayan, pemerintah membuat program Bina Kelompok Perikanan. Cakupan bina kelompok perikanan (kelompok) adalah kelompok perikanan baik kelompok perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan yang mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota seperti pembinaan peningkatan produksi perikanan dan manajemen pengelolaan usaha perikanan serta kelompok yang mendapatkan bantuan sarana produksi perikanan dan kelompok ini terdiri dari kelompok usaha bersama (kubek) Perikanan dan kelompok wanita pesisir.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah berupaya untuk memberdayakan nelayan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan manajemen usaha nelayan skala kecil antara lain: (1) program pendampingan dan pembinaan manajemen usaha; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil; dan (3) pengembangan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui program *science and techno-park* (STP) guna meningkatkan akses teknologi dan informasi.



TUJUAN 15. Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 10 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan (ada di Bab 3), dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Program Tujuan 15. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
3. Program Pemanfaatan Potensial Sumberdaya Hutan
4. Program Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
6. Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
7. Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
8. Program Pengembangan kawasan Strategis

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 disajikan pada Tabel 2.6 Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 15. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 15 tercantum pada tabel tersebut.

Tabel 2.6. Formulir Evaluasi Pencapaian SDGs Tujuan 15

Nama Tujuan (1): 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekargaman hayati							
Nama Target (2): 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Tahun Dasar/ Baselin e 2018 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019 (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019 (9)	Status (10)
15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	RENSTR A DLHK 2017-2022; Neraca SD Hutan/t ahun	%	64	n.a	n.a	n.a
15.2	Pada tahun 2021, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global						
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Data lahan kritis DLHK 2018; Statistik Kehutan an 2019	Ha	283,648.80	n.a	631,200	Lahan terdegrasi bertambah
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi	BKSDA	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

	ekosistemnya						
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	RENSTR A DLHK 2017-2022	unit	6	6	6	Tercapai
15.3	Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi						
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	BPDAS HL; BPS	Ha	335341	188630	13150	Belum tercapai
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal						
15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Laporan Perkara; Putusan Pengadilan terhadap perkara	%	116	n.a	n.a	n.a
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi	Laporan MONEV BKSDA	n.a	n.a	61	0	n.a
15.a	Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan						
15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	BKSDA	n.a	n.a	100	0	n.a

TUJUAN 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
 Berdasarkan penelusuran indikator evaluasi RENSTRA dan RENJA Provinsi Gorontalo tahun 2018 pada goal 15, dari 9 (sembilan) indikator tersebut hanya ada 4 indikator yang mencapai target SDGs.

Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional
Berdasarkan penelusuran indikator pada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, data kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan, dari target 63, jumlah capaian sebanyak 64, artinya angka tersebut menunjukkan luas kawasan hutan bertambah dari luas lahan secara keseluruhan.

Target 15.2 Pada tahun 2021, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global

Dari 3 (tiga) indikator tersebut, hanya 2 yang mencapai target SDGs yaitu jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan dan data proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan yang diperoleh dari data lahan kritis DLHK 2018 dan Statistik Kehutanan 2019. Tahun 2018 luas lahan kritis sebanyak 283.648,80 hektar, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 631.200 hektar, artinya luas lahan kritis bertambah. Sementara pada indikator luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya dari angka 994,62 hektar tahun 2018 hingga tahun 2019, capaian target masih 0 (nol).

Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi

Dari 1 (satu) indikator tersebut, yakni proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dari target 335.341 hektar, evaluasi jumlah capaian masih 13.150 hektar (3,92%). Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pengelolaan kehutanan adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan dan lahan untuk kepentingan non kehutanan, baik berupa perambahan hutan, pencurian kayu (*illegal logging*), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang, isu perubahan iklim serta rendahnya pemanfaatan nilai hasil hutan non kayu.

Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal

Dari 3 (tiga) indikator tersebut, hanya 1 yang mencapai target SDGs yaitu persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. Data tersebut diperoleh dari laporan perkara dan putusan pengadilan terhadap perkara sebanyak 2 (dua) target yang tercapai di tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 ada 5 kasus laporan penyelesaian tindak pidana LHK yang diperoleh dari dokumen evaluasi Renja DLHK tahun 2019.

Sementara proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap, dan jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi, capaian target masih 0 (nol).

Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan

Dari 1 (satu) indikator tersebut yaitu Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan capaiannya masih 0 (nol) karena belum ada datanya.



TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 TPB/SDGs Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 27 indikator. Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama (enabling) dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 mengacu pada tiga isu utama yaitu adanya perdamaian (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*), serta keberadaan institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Dalam kaitannya ketiga isu utama tersebut, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo berupaya untuk mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan. Di bidang penegakan rule of law, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo telah berupaya dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan dengan ditunjukkan pada pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif juga menjadi modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Indonesia menekankan pada upaya pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, selain menjaga iklim demokrasi.

Dalam lima tahun terakhir apabila mengacu pada target tahun kedua, dapat dilihat beberapa indikator yang capaiannya sesuai dengan target yaitu pada target mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di Provinsi

Gorontalo, Target akses keadilan bagi semua orang maupun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan di tingkat Provinsi Gorontalo.

Berikut ringkasan status pencapaian tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh :

Nama Tujuan : 16.Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh							
Nama Target : 16.1 Secara Signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Polda Gorontalo	Kasus	16	NA	12	Menurun
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Polda Gorontalo	Kasus	235	NA	115	Menurun
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	P2TP2A	Kasus	0	Menurun	Menurun	Menurun

Nama Tujuan : 16.Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh							
Nama Target : 16.3 Menggalakkan Negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Kemenkumham	Kasus	184	270	87	
16.3.1.(c)	Jumlah	Kemenkumhan	%	100%	100%	100%	

	<p> pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui siding di luar Gedung pengadilan ; pembebasan biaya perkara dan pos layanan hukum </p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Tujuan : 16.Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh							
Nama Target : 16.6 Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bappeda	%	100%	100%	100%	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Bappeda	%	100%	100%	100%	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Bappeda	%	100%	100%	100%	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Ombudsman	%	80	100	NA	

Nama Tujuan : 16.Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh							
Nama Target : 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif, dan representative di setiap tingkatan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat DPRD	%	19,4	NA	19,4	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif	BKD	%	NA	NA	74,42	



Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan ini berbicara tentang bekerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan Agenda Pasca-2015 yang telah disetujui. Memperkuat perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pendapatan dan pajak daerah. Pada tingkat daerahlah kebijakan yang jelas dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani.

Pemerintah daerah telah berkolaborasi secara internasional selama lebih dari seratus tahun sebagai bagian dari gerakan pemerintah daerah internasional. Pemerintah daerah siap dan bersedia untuk berpartisipasi dalam kancah global. Data-data daerah yang dapat diandalkan akan menjadi sarana penting dalam memantau kemajuan pada tingkat sub-nasional dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

Tabel. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Kondisi 2019		
				2016	Target	Capaian	Status Capaian
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya		Persen	5.29%	n.a	4.71%	
	PDRB	BPS	Triliun	31.697	n.a	41.15	
	pendapatan pemerintah	RPJMD	Triliun	1.67601	1.82	1.94	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	RPJMD	Persen	0.885%	n.a	0.941%	
	Pajak daerah		Miliar	280.594		387.323	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	RPJMD, Renstra Badan Keuangan	Persen	17.58%	18.45%	19.97%	
	Belanja daerah	BPS	Miliar	1595.89		1939.258	
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.2.(a)	persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan ibu kota	PT.Telkom	Persen	100	100	100	

	Kabupaten/Kota (IKK)						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan di perdesaan	PT.Telkom					
17.6.2.(c)	proporsi penduduk terlayani mobile broadband	BPS	Persen	19.63%	n.a	n.a	
17.8 Mengoperasionisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	proporsi individu yang menggunakan internet	bps (Susenas)	Persen	27.31%	n.a	41.78%	
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat produksi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020							
17.11.1.(a)	pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	Persen	-0.86%			
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(b)	tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)	Renstra PMD		Ada	ada	Ada	
17.19.2.(c)	jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	BPS		8192	12606	n,a	

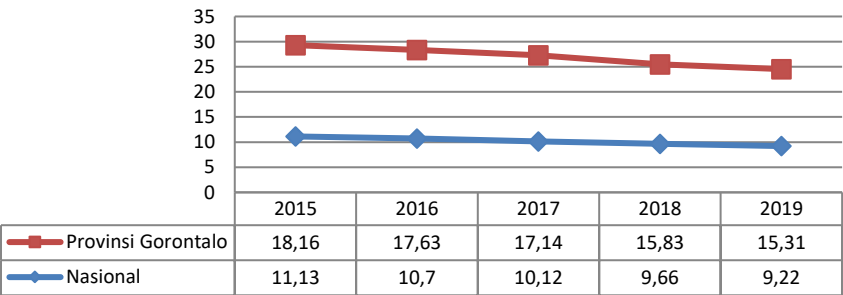
BAB 3
TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS
DI PROVINSI GORONTALO

3.1. Status Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Dalam lima tahun terakhir, secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tingkat keberhasilan Provinsi Gorontalo dalam upaya pencapaian target SDGs Tujuan 1 digambarkan melalui penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di tahun 2019. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo yang menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2019 sebesar 15.31 persen, sedangkan pada Maret 2019 tercatat sebesar 15.52 persen. Artinya, terjadi penurunan angka kemiskinan 0.21 persen sepanjang tahun 2019. Disamping target SDGs, capaian penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo juga berhasil mencapai target penurunan tingkat kemiskinan tahun 2019 yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 16.09 persen.

Gambar. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, Tahun 2015-2019



Sumber: BPS (diolah)

Tren penurunan juga terjadi pada jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir. Pada September 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 200.91 ribu jiwa, sedangkan pada September 2018 sebanyak 188.30 ribu jiwa. Terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 12.61 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo kembali menurun 3.59 ribu jiwa sehingga pada September 2019 tercatat sebanyak 184.71 ribu jiwa. Kondisi ini sejalan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih terkonsentrasi di pedesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Pada

September 2019, penduduk miskin di wilayah pedesaan mencapai 164.38 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin yang tinggal di wilayah perkotaan hanya sebesar 20.33 ribu jiwa pada periode yang sama. Begitupula pada Maret 2020, data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan sebesar 164.67 ribu jiwa, masih lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah perkotaan yaitu 20.35 ribu jiwa. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin baik di pedesaan dan di perkotaan sama-sama mengalami penurunan. Di wilayah pedesaan, persentase penduduk miskin menurun sebesar 0.12 persen dari 23.57 persen pada September 2019 menjadi 23.45 persen pada Maret 2020. Sedangkan di daerah perkotaan menurun sebesar 0.02 persen dari 3.99 persen pada September 2019 menjadi 3.97 persen pada Maret 2020.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Maret 2019 – Maret 2020		
Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
- Maret 2019	21.27	4.21
- September 2019	20.33	3.99
- Maret 2020	20.35	3.97
Pedesaan		
- Maret 2019	164.76	23.79
- September 2019	164.38	23.57
- Maret 2020	164.67	23.45
Perkotaan dan Pedesaan		
- Maret 2019	186.03	15.52
- September 2019	184.71	15.31
- Maret 2020	185.02	15.22

Sumber: BPS (diolah)

Dari sisi pembangunan manusia, kualitas SDM Provinsi Gorontalo mengalami kemajuan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Capaian IPM di Provinsi Gorontalo secara garis besar mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0.70 selama periode 2016-2019. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Gorontalo memiliki capaian sebesar 68.49, meningkat 0.78 dibandingkan dengan capaian IPM pada tahun 2018 sebesar 67.71. Meskipun demikian, IPM Provinsi Gorontalo masih berada dibawah rata-rata IPM Nasional. Apabila dilihat berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh Kota Gorontalo yaitu sebesar 77.08. Sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara berada di urutan terendah dengan IPM sebesar 64.52.

Tabel. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019					
Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Boalemo	62.86	63.42	64.22	64.99	65.53
Kab. Gorontalo	63.63	64.22	64.95	65.78	66.69
Kab. Pohuwato	62.50	63.17	63.88	64.44	65.27
Kab. Bone Bolango	66.83	67.48	68.11	69.06	69.63
Kab. Gorontalo Utara	62.55	63.02	63.52	64.06	64.52
Kota Gorontalo	75.62	75.75	76.09	76.53	77.08

Provinsi Gorontalo	65.86	66.29	67.01	67.71	68.49
Nasional	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92

Sumber: BPS (diolah)

Guna menekan angka kemiskinan, maka ketahanan masyarakat miskin dan rentan perlu untuk terus dibangun.Ketimpangan penduduk miskin di area Kabupaten/Kota yang masih cukup besar mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah yang di wilayahnya masih terdapat kantong-kantong kemiskinan. Aspek penanganan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan ke wilayah pedesaan yang selama ini menjadi tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas keluarga miskin, dan pemenuhan kebutuhan/layanan dasar merupakan program utama yang efektif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Adapun perluasan jangkauan dalam penyediaan layanan publik diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Akses terhadap pelayanan kesehatan. Pada aspek cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin, pada tahun 2019 pemerintah telah memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jamkesta/Jamkesda kepada 414,494 jiwa.Namun demikian, sampai dengan Triwulan I 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat cakupan kepesertaan JKN baru mencapai 78 persen. Hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Gorontalo masih melakukan validasi dan verifikasi kembali guna menghasilkan data penerima manfaat yang lebih akurat. Melalui proses validasi dan verifikasi diharapkan status warga miskin di Provinsi Gorontalo menjadi lebih jelas sehingga intervensi Jamkesta ataupun bantuan sosial lainnya baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota lebih tepat sasaran.

Akses terhadap kebutuhan sumber air minum dan sanitasi layak. Pada tahun 2019, Provinsi Gorontalo telah mencapai 94.19 persen akses pada sumber air minum layak dan 74.57 persen pada sanitasi layak.Untuk air minum, Provinsi Gorontalo berhasil meningkatkan akses layak sebesar 15.2 persen dari 78.99 persen di tahun 2018 menjadi 94.19 persen di tahun 2019. Sedangkan untuk sanitasi, terjadi peningkatan cakupan sebesar 8.99 persen dari 65.58 persen di tahun 2018 menjadi 74.57 persen di tahun 2019.Pencapaian ini merupakan hasil daripembangunan sarana dan pra-sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat yang telah dilakukan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kotasalah satunya melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

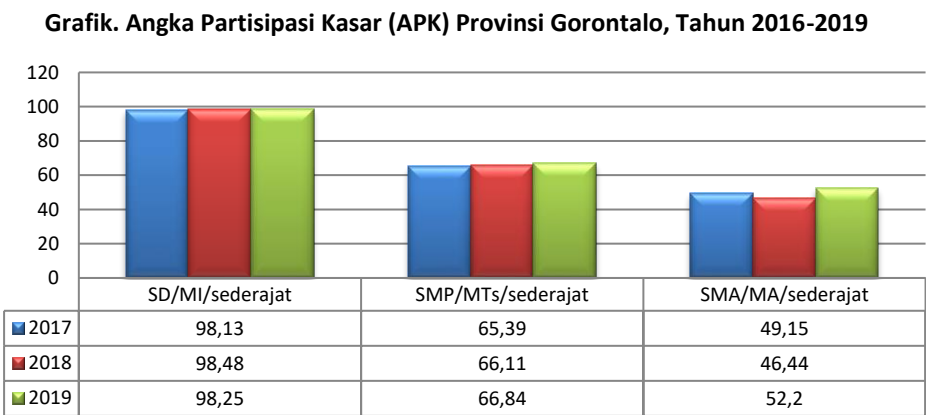
Tabel. Data cakupan akses air minum layak dan sanitasi layak Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2017	2018	2019
1.	Akses Air Minum Layak	%	75.00	78.99	94.19
2.	Akses Sanitasi Layak	%	58.62	65.58	74.57

Sumber: BPS(diolah)

Meskipun cakupan akses air minum dan sanitasi layak menunjukkan perkembangan yang positif, namun pemerintah masih dihadapkan pada tantangan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi dikarenakan sumber air yang semakin terbatas. Disamping itu, perlu adanya penyesuaian pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan penyediaan rumah layak huni dimana masih terdapat beberapa kawasan kumuh yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota yang memerlukan perhatian dan penanganan secara lebih optimal.

Akses terhadap pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan berdasarkan ketepatan usia adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Gambar berikut memperlihatkan APM jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA di Provinsi Gorontalo.



Sumber: BPS (diolah)

APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai 100 persen, artinya masih ada penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Pada tahun 2019, APM antar jenjang pendidikan memiliki kemiripan dengan pola APK dimana jenjang pendidikan SD/MI/average memiliki capaian APM tertinggi sebesar 98.25 persen kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Adapun APM SMP/MTs/average dan SMA/MA/average pada tahun 2019 masing-masing sebesar 66.84 persen dan 52.2 persen. Jangkauan terhadap fasilitas, kualitas layanan yang disediakan, dan pembiayaan menjadi penyebab masih rendahnya partisipasi pendidikan menengah, khususnya pada kelompok miskin.

Sejauh ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam upaya pencapaian penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif serta mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar, antara lain:

- (1) Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia.
- (2) Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN.
- (3) Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara BPJS dengan layanan kesehatan.
- (4) Pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi.

- (5) Penguatan institusi implementasi jaminan sosial.
- (6) Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama pada paket pelayanan dasar minimal dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (7) Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan.

Namun demikian, kemunculan virus Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan yang beberapa tahun terakhir ini telah menurun. Penyebaran virus ini patut menjadi perhatian meskipun kasus pertama di Provinsi Gorontalo baru ditemukan pada April 2020 namun saat ini jumlahnya terus bertambah. Tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemunculan pandemi ini juga berdampak terhadap pencapaian target SDGs sehingga diperlukan penyesuaian strategi didalamnya. Langkah antisipatif perlu dilakukan sebagai bentuk mitigasi atas terdampaknya kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena pandemi ini menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin. Kelompok menengah pun perlumendapat perhatian lebih agar tidak turun menjadi kelompok miskin.

Dalam kondisi ini, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar garis kemiskinan, yaitu: *Pertama*, memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah saat ini. *Kedua*, mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih sederhana, disamping terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan. Kejadian pandemi Covid-19 ini dapat menjadi titik awal bagi pemerintah untuk lebih serius melakukan pemutakhiran data penerima perlindungan sosial agar intervensi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran.

Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan menjaga stabilitas biaya-biaya yang dikontrol pemerintah, seperti BBM, listrik, dan gas. *Keempat*, meningkatkan insentif bagi petani, peternak dan nelayan. Ditengah persebaran pandemi Covid-19, petani, peternak dan nelayan yang terus memproduksi dihadapkan pada kondisi minimnya serapan pasar. Selain menjaga kondisi ekonomi dan sosial, pemberian insentif melalui skema kebijakan pembelian produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan oleh pemerintah dinilai dapat membantu pemerintah dalam mengamankan ketersediaan stok pangan.

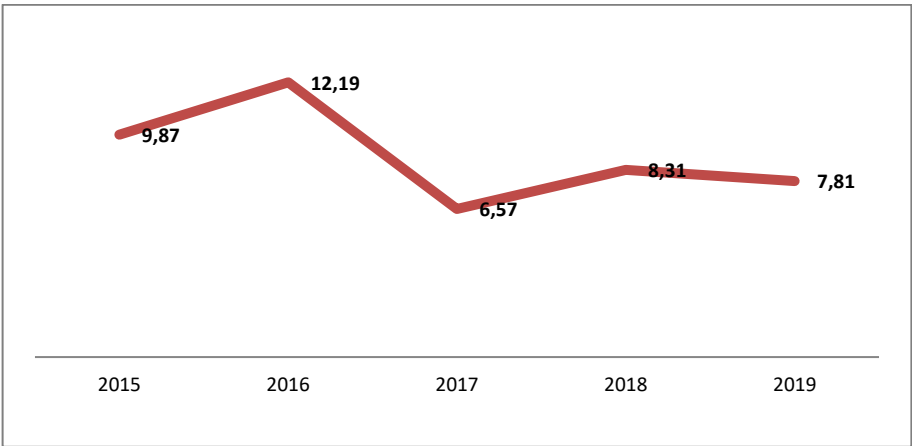
Dalam praktiknya, sejumlah program telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan memberi kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan

khususnya sejak kemunculan pandemi Covid-19. Program-program tersebut antara lain Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BNPT-D), Bantuan Benih, Pendidikan Gratis, dan Bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat. Disamping itu, pelaksanaan pasar murah bahan kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan gratis yang digelar secara rutin dan dikemas dalam bentuk Bakti Sosial (Baksos) NKRI Peduli juga diharapkan dapat memperbaiki kelesuan ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19 serta menjaga stabilitas pengembangan ekonomi Provinsi Gorontalo jangka panjang.

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Masalah kerawanan pangan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya produksi pangan tetapi juga bagaimana akses dan pemanfaatan masyarakat terhadap pangan itu sendiri. Rawan pangan dan gizi pada dasarnya merupakan refleksi dari ketidakmampuan individu/masyarakat untuk memenuhi standar kebutuhan yang berpengaruh pada pertumbuhan dan kesehatan. Kasus rawan pangan dan gizi banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Di Provinsi Gorontalo, angka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) mengalami penurunan secara konsisten dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, angka PoU Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 7.81 persen, menurun 2.06 persen dari angka PoU di tahun 2015 sebesar 9.87 persen. Penurunan PoU ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di tahun 2019.

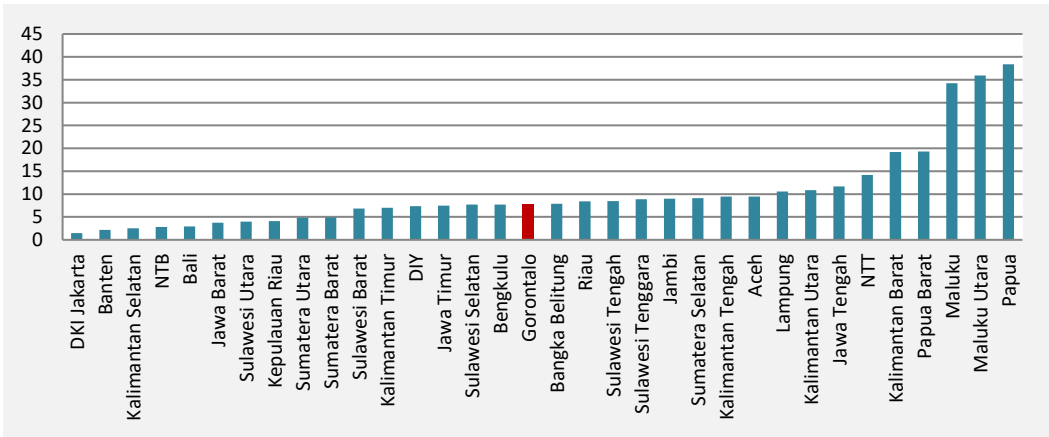
Grafik. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/*Prevalance of Undernourishment* (PoU) Provinsi Gorontalo, Tahun 2015-2019



Sumber: BKP Kementerian Pertanian (diolah)

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, PoU Provinsi Gorontalo hampir mendekati capaian PoU nasional sebesar 7.66 persen di tahun 2019 dan jauh lebih baik dibandingkan dengan PoU di beberapa provinsi lainnya. Pada tahun 2019, DKI Jakarta memiliki angka PoU terendah sebesar 1.45 persen, sedangkan Provinsi Papua memiliki angka PoU tertinggi sebesar 38.35 persen.

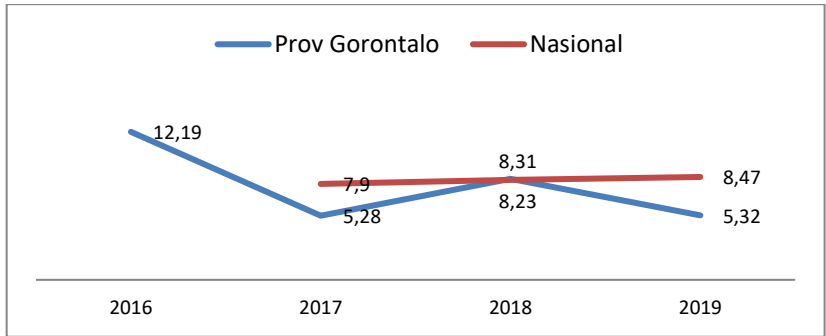
Grafik.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment (PoU)* per Provinsi, Tahun 2019



Sumber: BKP Kementerian Pertanian (diolah)

Dari aspek konsumsi pangan, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari mengalami penurunan yang signifikan sebesar 6.87 persen dari 12.16 persen di tahun 2016 menjadi 5.32 persen di tahun 2019. Dalam tiga tahun terakhir Provinsi Gorontalo berhasil menekan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah rata-rata nasional sebagaimana yang terlihat dalam grafik dibawah. Artinya, penduduk Provinsi Gorontalo yang mengalami kekurangan konsumsi makanan yang cukup untuk dapat hidup sehat dan aktif semakin berkurang. Kondisi ini tidak terlepas dari intervensi berbagai program pemerintah dalam menciptakan ketahanan dan keanekaragaman pangan sekaligus sebagai upaya untuk mendorong perbaikan gizi masyarakat.

Grafik. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Dibawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Provinsi Gorontalo, Tahun 2016-2019

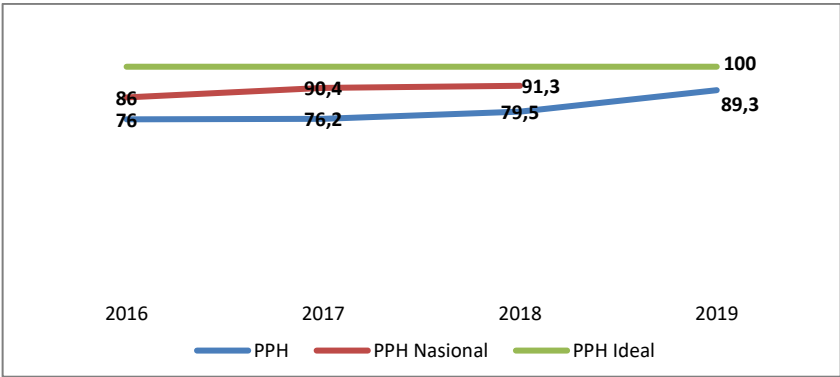


Sumber: BPS (diolah)

Meskipun dari sisi ketersediaan pangan telah mencukupi, namun Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada tantangan optimalisasi pemanfaatan pangan. Situasi konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masih menunjukkan kondisi yang belum ideal meskipun

secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, skor PPH Provinsi Gorontalo memiliki capaian sebesar 89.3, meningkat 9.5 dari tahun 2018 dengan skor PPH sebesar 79.5.

Grafik. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019



Sumber: BKP Kementrian Pertanian dan LKPD Provinsi Gorontalo (diolah)

Data BKP tahun 2018 menunjukkan bahwa situasi konsumsi masyarakat Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh kelompok padi-padian. Hasil analisa pola konsumsi pangan wilayah memperlihatkan bahwa konsumsi pangan yang berasal dari sumber karbohidrat mayoritas dipenuhi dari beras, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih kurang. Sumber protein masih didominasi oleh sumber protein hewani yang dipenuhi dari konsumsi ikan, sedangkan konsumsiprotein yang bersumber dari telur, susu, dan kacang-kacangan masih sangat kurang.

Tabel. Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi Gorontalo, Tahun 2016-2018

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Pangan (kg/kap/tahun)		
	2016	2017	2018
I. Padi-padian			
a. Beras	124.3	120.9	107.9
b. Jagung	11.3	10.7	7.7
c. Terigu	8.6	9.7	9.7
II. Umbi-umbian			
a. Singkong	8.4	15.1	7.0
b. Ubi jalar	2.8	4.8	2.0
c. Kentang	0.5	0.7	0.8
d. Sagu	1.1	1.0	0.5
e. Umbi lainnya	0.2	0.3	0.2
III. Pangan hewani			
a. Daging ruminansia	0.9	1.0	1.2
b. Daging unggas	4.0	4.6	3.5
c. Telur	3.8	4.3	3.4
d. Susu	2.5	1.3	2.1
e. Ikan	43.6	45.3	33.5
IV. Minyak dan Lemak			
a. Minyak kelapa	0.5	0.4	0.2
b. Minyak sawit	14.2	13.7	10.2
c. Minyak lainnya	-	-	0.1
V. Buah/biji berminyak			
a. Kelapa	5.9	6.1	1.9

b. Kemiri	2.4	2.5	0.8
VI. Kacang-kacangan			
a. Kedelai	6.8	8.3	7.0
b. Kacang tanah	0.7	1.4	0.5
c. Kacang hijau	-	-	0.4
d. Kacang lain	-	-	0.1
VII. Gula			
a. Gula pasir	14.5	13.1	7.7
b. Gula merah	0.6	0.7	0.4
VIII. Sayur dan buah			
a. Sayur	54.9	52.9	43.5
b. Buah	33.2	36.3	25.1
IX. Lain-lain			
a. Minuman	22.5	29.5	22.8
b. Bumbu-bumbuan	3.6	3.4	2.4

Sumber: BKP Kementerian Pertanian (diolah)

Diversifikasi konsumsi pangan termasuk didalamnya protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam rumah tangga menjadi langkah konkrit dalam upaya pencapaian Skor PPH Konsumsi ideal. Adapun program dan kegiatan yang telah dijalankan di Provinsi Gorontalo sebagai upaya mencapai target konsumsi pangan ideal, diantaranya: (1) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (2) Kawasan Mandiri Pangan (KMP); (3) Gerakan Tanam Cabe (GERTAM Cabe); (4) Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat; (5) GERMAS dalam mengkonsumsi pangan lokal atau Go Pangan Lokal; dan (6) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang bersumber dari pangan umbi-umbian untuk dijadikan pangan alternatif sebagai pangan pengganti beras.

Program KRPL dan KMP terus digalakkan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan penganekaragaman pangan masyarakat. Pada tahun 2019, terdapat 5 kelompok mandiri yang telah dibina sebagai bagian dari program pemberdayaan kawasan mandiri pangan. Sedangkan melalui program KRPL, masyarakat didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta sebagai sumber pendapatan secara berkelanjutan. Pengembangan program ini dinilai dapat mengurangi pengeluaran pangan masyarakat, mendukung diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, konservasi sumber daya genetik lokal, serta mengurangi jejak karbon dan emisi (BKP, 2018).

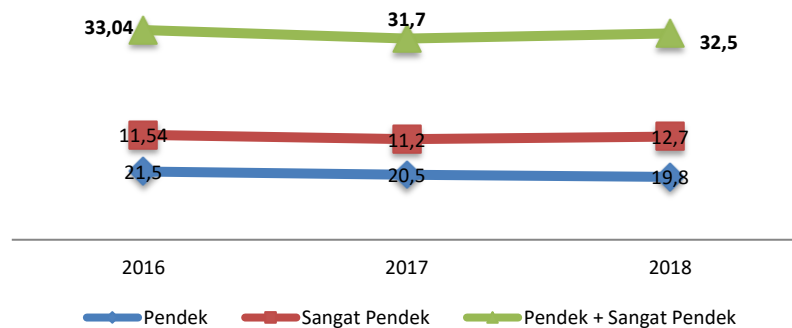
Permasalahan terkait kerawanan pangan kiranya dapat juga diminimalisir melalui program dan kegiatan lainnya, seperti:

- (1) Fasilitasi kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional;
- (2) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;

- (3) Meningkatkan kerjasama Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta *stakeholders* lainnya; dan
- (4) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, salah satunya melalui fasilitasi UMKM;
- (5) Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan bahan baku dan produk pertanian sehingga mampu meningkatkan kemandirian berbasis kearifan lokal;
- (6) Regenerasi petani untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan, termasuk didalamnya mengubah pola pikir generasi muda terhadap pertanian; dan
- (7) Membangun pertanian yang lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar.

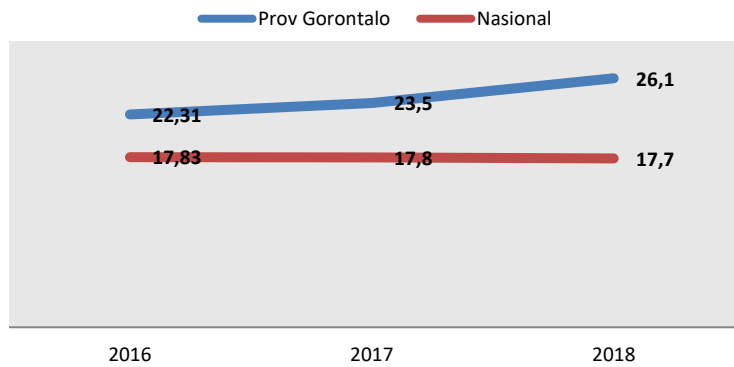
Erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan, upaya pemenuhan gizi masyarakat juga perlu menjadi perhatian utama pemerintah karena jumlah balita yang mengalami kekurangan gizi dan *stunting* di Provinsi Gorontalo masih menunjukkan tren yang cenderung meningkat. BPS mencatat prevalensi balita *stunting* pada tahun 2018 mencapai 32.5 persen, meningkat 0.8 persen dari tahun 2017 dengan capaian sebesar 31.7 persen. Sedangkan prevalensi balita (0-59 bulan) kekurangan gizi mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dengan capaian sebesar 22.31 persen di tahun 2016, 23.5 persen di tahun 2017 dan 26.1 persen di tahun 2018. Provinsi Gorontalo masih berada diatas angka rata-rata kekurangan gizi nasional yang secara konsisten mengalami penurunan. Kondisi ini patut menjadi perhatian karena balita/baduta yang mengalami *stunting* dan kurang gizi akan rentan terhadap penyakit, menurun tingkat produktivitasnya dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Grafik. Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2018



Sumber: BPS (diolah)

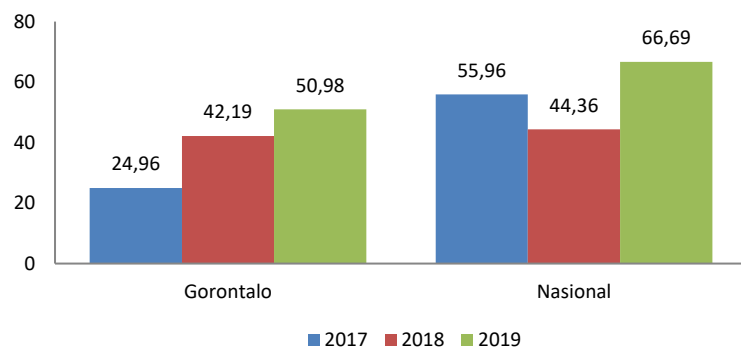
Grafik. Prevalensi Balita (0-59 Bulan) Kekurangan Gizi di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2018



Sumber: BPS (diolah)

Masalah kekurangan gizi dapat disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, masalah kekurangan gizi dipengaruhi oleh kurangnya asupan gizi secara kuantitas maupun kualitas, sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata akibat faktor geografis dan demografi, pola asuh anak yang kurang memadai, kurang baiknya kondisi sanitasi lingkungan, dan rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan gizi yaitu melalui pemberian ASI eksklusif pada bayi serta menu makanan yang bervariasi pada balita. Di Provinsi Gorontalo, cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif mengalami peningkatan cukup signifikan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019, capaian atas indikator tersebut adalah sebesar 50.98 persen, meningkat 26.02 persen dari capaian tahun 2017 yang hanya sebesar 24.96 persen.

Grafik. Cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Di Provinsi Gorontalo, Tahun 2017-2019



Sumber: BPS (diolah)

Di masa mendatang, pencapaian keberhasilan penyediaan pangan dan pemenuhan gizi akan dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan penduduk. Terkait hal ini, terdapat sejumlah tantangan harus dihadapi di Provinsi Gorontalo, antara lain:

- (1) Pendapatan masyarakat yang masih rendah dibandingkan dengan harga kebutuhan pangan secara umum;
- (2) Kampanye dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan yang masih belum tepat sasaran;

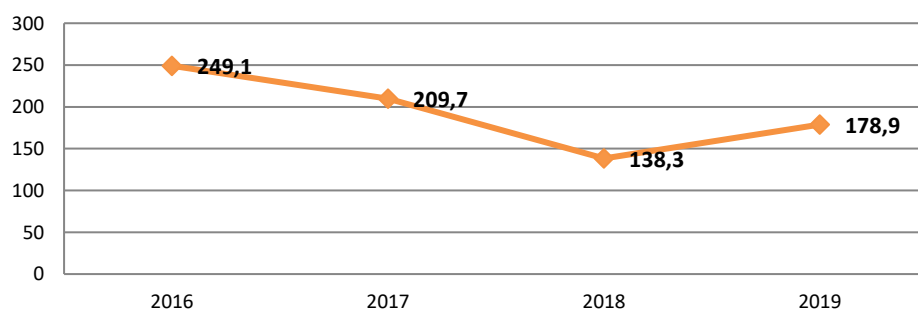
- (3) Kualitas pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman;
- (4) Masih adanya kesalahan persepsi dalam masyarakat yaitu “belum makan jika belum mengkonsumsi nasi”;
- (5) Terbatasnya teknologi pengolahan pangan lokal;
- (6) Produksi dan pemanfaatan sumber pangan lokal yang masih rendah; dan
- (7) Adanya bencana alam dan perubahan iklim global.

Selain itu, menurunnya akses terhadap pangan sebagai akibat dari maraknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi setelah munculnya pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian Tujuan 2 SDGs. Meningkatkan kapasitas penghasil dan mata pencaharian menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya beli rumah tangga. Sejumlah program penanggulangan kemiskinan sepatutnya dirancang dengan baik dan memiliki target kunci untuk mencapai tujuan ini. Diperlukan sinergitas dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkaji serta komunitas madani di pusat dan daerah) sehingga program-program yang berjalan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan yang sama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

TUJUAN 3 – KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Keluarga sebagai komponen masyarakat berperan signifikan dalam mempengaruhi status kesehatan. Dalam penyelenggaraannya, kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia karena merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang anak. Salah satu parameter untuk melihat keberhasilan dalam penyelenggaraan kesehatan adalah melalui indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Perkembangan AKI di Provinsi Gorontalo selama 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Terjadi penurunan AKI yang cukup signifikan selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada periode 2016-2018. Tetapi pada tahun 2019, AKI di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 138,3 per 100.000 KH di tahun 2018 menjadi 178,9 per 100.000 KH di tahun 2019.

Grafik. Tren Angka Kematia Ibu per 100.000 KH di Provinsi Gorontalo, Tahun 2016-2019



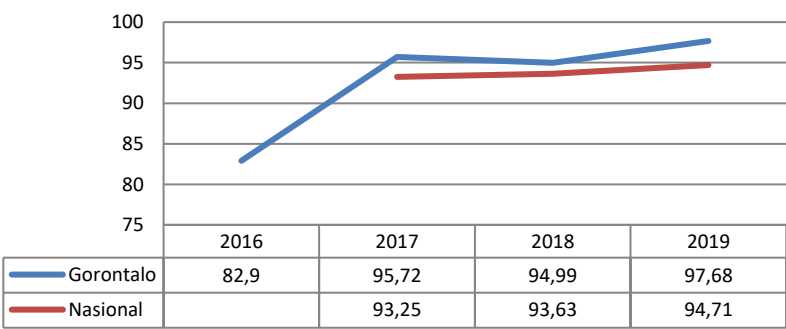
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo 2017-2018 dan LKPJ 2019 (diolah)

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator AKI juga dapat digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan AKI penting untuk dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan program P4K (perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi), peningkatan pelaksanaan kelas ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

AKI dapat diturunkan dengan persalinan tepat dan cepat yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Di Provinsi Gorontalo, data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar ibu melahirkan telah ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Hal ini terlihat dari persentase PKK usia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2019 mencapai angka 97.68 persen, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 94.71 persen. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya kaderisasi dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sehingga informasi terkait kehamilan dapat tersampaikan dengan baik, tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas.

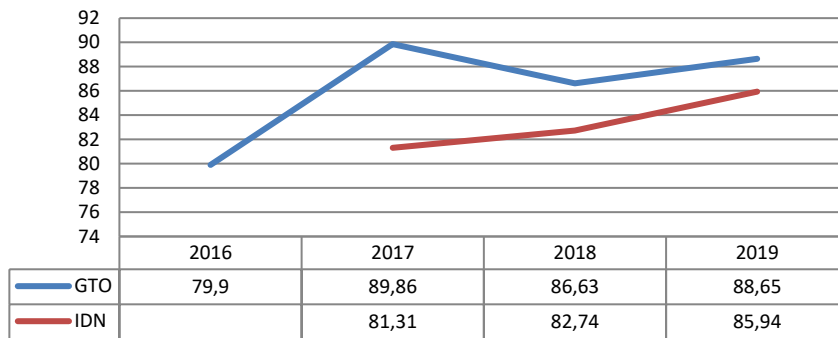
Proporsi ibu hamil yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan juga memiliki tren peningkatan yang sama. Data BPS menunjukkan terjadi peningkatan ibu hamil yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dari 79.9 persen di tahun 2016 menjadi 89.86 persen di tahun 2017. Pada tahun 2018, cakupan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan sempat mengalami penurunan sebesar 3.23 persen namun kembali meningkat 2.02 persen di tahun 2019 menjadi 88.65 persen, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 85.94 persen.

Grafik. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Gorontalo



Sumber: BPS (diolah)

Grafik. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Provinsi Gorontalo



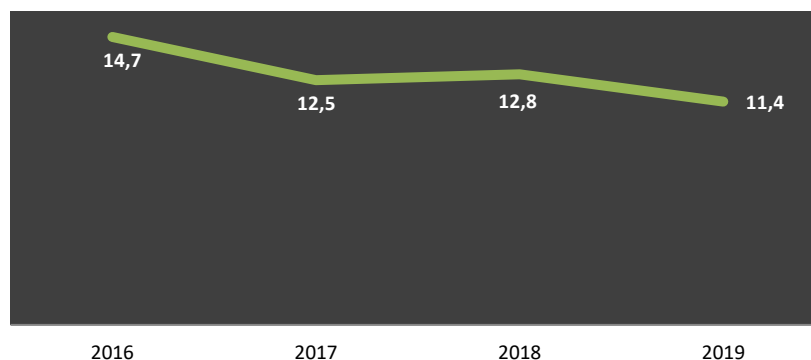
Sumber: BPS (diolah)

Meskipun indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan memiliki capaian yang cukup baik, namun kondisi ini tidak berbanding lurus dengan tren AKI yang justru meningkat di tahun 2019. Artinya, ada faktor lain yang menjadi penyebab peningkatan AKI yaitu masih kurangnya tingkat kepatuhan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya terutama pada trimester pertama (0-3 bulan) usia kehamilan sehingga jumlah kunjungan antenatal lengkap menjadi rendah (LKPJ 2019).

Selain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi tolak ukur untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya, capaian AKBa di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, Provinsi Gorontalo memiliki capaian AKBa sebesar 14.7 per 1.000 KH, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 11.4 per 1.000 KH. Capaian pada indikator ini lebih rendah dari target SDGs yaitu 25 per 1.000 KH. Umumnya, penyebab kematian balita disebabkan oleh diare dan *pneumonia*.

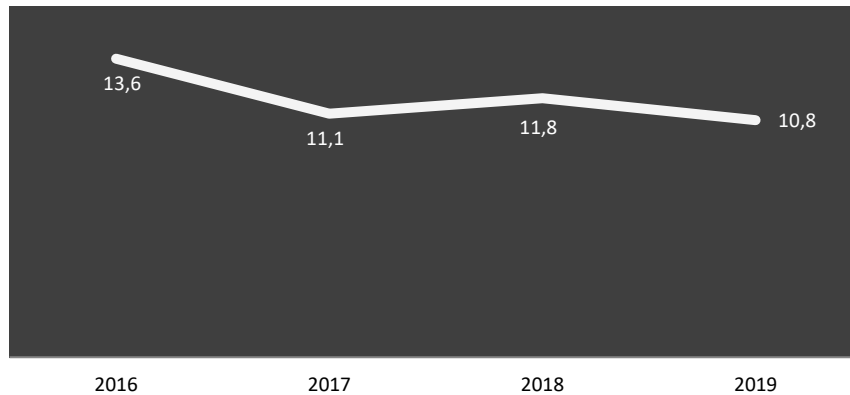
Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kematian bayi tercatat sebanyak 10.8 per 1.000 KH, menurun dari AKB tahun 2018 sebanyak 11.8 per 1.000 KH. Meskipun AKB di tahun 2019 masih sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 10.6 per 1.000 KH, namun berhasil mencapai target SDGs yaitu 23 per 1.000 KH.

Grafik. Tren Angka Kematian Balita (AKBa) di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019



Sumber: LKPJ 2019 dan BPS (diolah)

**Grafik. Tren Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Gorontalo
Tahun 2016-2019**



Sumber: LKPJ 2019 dan BPS (diolah)

Meskipun capaian AKBa dan AKB di Provinsi Gorontalo sudah lebih rendah dari target SDGs, namun masih diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan khususnya untuk penyakit penyebab kematian balita serta kerjasama lintas sektor untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya menekan AKI, AKBa dan AKB, antara lain: (a) masih adanya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang kurang optimal meskipun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudah membaik; (b) terbatasnya ketersediaan sumber daya strategis untuk kesehatan ibu dan anak; (c) masih adanya kendala terkait jaminan kesehatan; dan (d) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak.

Terkait dengan Angka Kesakitan (*morbiditas*), maka derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo tercermin dalam angka prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM). Untuk penyakit menular, prevalensi Tuberkulosis (TB) pada tahun 2019 tercatat sebanyak 230 per 100.000 penduduk dengan target capaian sebanyak 246 per 100.000 penduduk. Kondisi ini mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2017 dengan prevalensi TB sebanyak 642 per 100.000 penduduk. Meskipun demikian, persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (*success rate*) pada tahun 2018 dan 2019 belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 93 persen. Pada tahun 2018, angka keberhasilan pengobatan TB hanya mencapai 52.2 persen, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 92.5 persen. Walaupun *success rate* di tahun 2019 hampir mencapai target yang ditetapkan, namun hasil pengobatan lainnya seperti kasus gagal dan putus berobat perlu diperhatikan agar tidak meningkatkan jumlah kasus TB di Provinsi Gorontalo.

Sedangkan untuk kasus HIV, prevalensi HIV pada populasi dewasa dilaporkan memiliki capaian sebesar 0.0129 persen (LKPJ 2019). Capaian pada indikator ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk periode yang sama yaitu kurang dari 0.05 persen. Adapun angka kasus HIV yang dapat diobati pada tahun 2019 mencapai 61.45 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen. Konseling dan tes HIV (*Sero Survey*) menjadi pintu masuk pada layanan

perawatan, dukungan dan pengobatan HIV sehingga diharapkan mampu menekan lebih jauh jumlah penderita. Pendekatan melalui kegiatan ini dapat dilakukan baik secara pasif/sukarela dimana pasien datang sendiri untuk meminta dilakukan tes HIV maupun pemberian layanan berdasarkan anjuran petugas kesehatan sebagai komponen standar layanan kesehatan.

Selain TB dan HIV, di tahun 2020 pemerintah difokuskan pada penanggulangan penyakit menular yang sedang melanda yaitu Covid-19. Pandemi Covid-19 membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia yang telah berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs. Meskipun Provinsi Gorontalo merupakan provinsi terakhir yang terpapar Covid-19, namun saat ini jumlah orang yang terpapar mencapai lebih dari 2.000 jiwa dan terus bertambah setiap harinya. Melihat situasi penyebarannya, perlu adanya pembenahan akses dan pelayanan kesehatan sebagai langkah antisipatif atas terdampaknya percepatan pencapaian target SDGs dalam urusan kesehatan. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, terdapat sejumlah kebijakan yang relevan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pasca pandemi, diantaranya:

- 1) Penguatan Germas (promotif dan preventif), meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, mencuci tangan dengan sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat dan pengelolaan limbah medis.
- 2) Penguatan *health security*, meliputi sistem peringatan dini (*alert system*), surveillance penyakit *real time*, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat.
- 3) Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes dan SDM kesehatan, meliputi pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan sistem rujukan, pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas, pemenuhan vaksin dan obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS), dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam negeri.

Untuk penyakit tidak menular (PTM), capaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren yang fluktuatif. Prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 memiliki capaian 29.64 persen, meningkat 5.84 persen dari tahun 2018 dengan capaian 23.8 persen. Hipertensi masih masuk dalam kategori 10 penyakit dengan jumlah penderita tertinggi di Provinsi Gorontalo sehingga diperlukan upaya yang komprehensif untuk penanggulangan dan pencegahannya. Bagitupula dengan prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 21.24 persen dari 15.4 persen di tahun 2018 menjadi 36.64 persen di tahun 2019. Dalam upaya pengendaliannya, peningkatan peran dan layanan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu) PTM dapat menjadi langkah yang efektif dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor PTM secara berkesinambungan. Disamping itu, penyuluhan secara masal dan konseling faktor risiko secara terintegrasi pada individu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi tindak lanjut untuk meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang cara mencegah dan mengendalikan faktor risiko PTM.

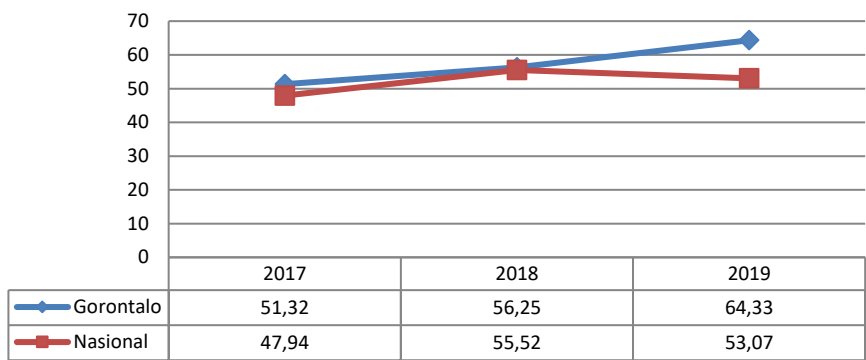
Terkait dengan pengendalian penduduk, Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 masih dalam kisaran 2,5 anak per wanita usia subur 15-49 tahun. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relatif sama dengan pencapaian Nasional yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu antara 2-3 anak per wanita. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) pada Pasangan Usia Subur (PUS) meningkat dalam tiga tahun terakhir dengan capaian sebesar 69.74 persen di tahun 2019, 0.78 persen lebih tinggi dari capaian tahun 2017 sebesar 68.96 persen.

Pada aspek peningkatan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program Jamkesta yang saat ini terintegrasi dengan JKN telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Program Jamkesta ini pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan 2019, jumlah penduduk yang menerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jamkesta/Jamkes pada tahun 2019 adalah sebanyak 414.494 juta jiwa, meningkat sangat signifikan dari capaian tahun 2018 sebanyak 204.501 juta jiwa. Optimalisasi layanan kesehatan masyarakat juga didukung dengan peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas kesehatan dimana pada tahun 2019 memiliki capaian sebesar 95.92 persen.

Berikut ini sejumlah program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang dapat mendukung percepatan pencapaian Tujuan 3 SDGs, antara lain:

1. Program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat yang menjadi program utama dalam rangka menurunkan AKI, AKBa dan AKB yang mencakup sejumlah kegiatan, yaitu: (a) Pendampingan ibu hamil berisiko selama masa kehamilan; (b) Penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi; dan (c) Pengadaan PMT Bumil KEK dan PMT Balita kurang gizi. Pemberian imunisasi lengkap pada bayi dan balita menjadi program yang efektif untuk mencegah penyakit yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Data BPS menunjukkan bahwa persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019, capaian imunisasi di Provinsi Gorontalo adalah 64.33 persen, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 53.07 persen.

**Grafik. Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
Di Provinsi Gorontalo, Tahun 2017-2019**



Sumber: BPS (diolah)

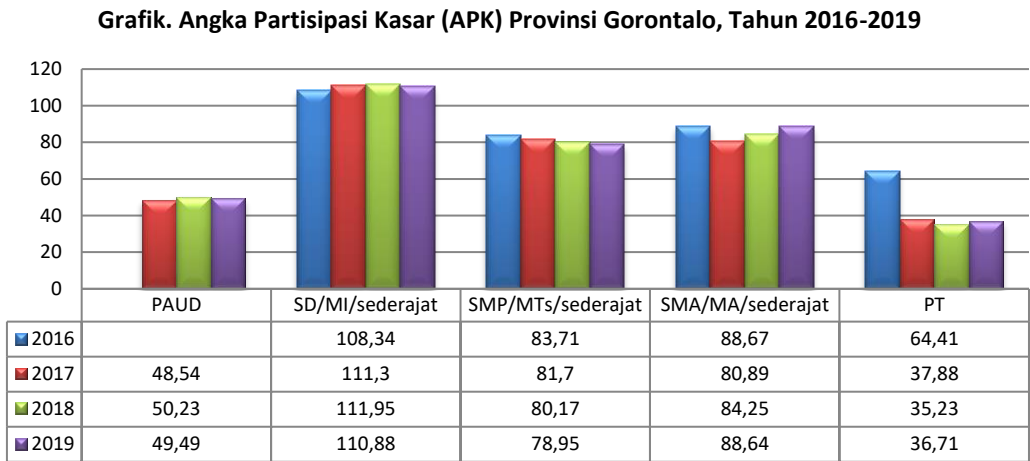
- 2. Program pencegahan, pengendalian penyakit dan masalah kesehatan jiwa dalam upaya menekan angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular. Adapun kegiatannya meliputi: (a) Penemuan, penanganan dan pembinaan tata laksana penyakit menular; (b) Sero Survey HIV/AIDS; (c) Surveillance PD3I dan monev pelaksanaan program imunisasi; (d) Penyelidikan epidemiologi KLB/wabah penyakit; dan (e) Deteksi dini faktor risiko PTM.
- 3. Program peningkatan mutu fasyankes, meliputi kegiatan penguatan kapasitas program pelayanan kesehatan primer.
- 4. Program kemitraan dan peningkatan pelayanan medic RS, meliputi kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dojter dan paramedic.
- 5. Program jaminan pemeliharaan kesehatan, meliputi kegiatan penanganan keluhan JKN, kegiatan Jamkesta, kegiatan kerjasama pelayanan pasien rujukan keluar daerah, kegiatan pelayanan pasien miskin/tidak mampu.

TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 SDGs merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan dengan menjamin terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan yang diimbangi dengan usaha peningkatan mutu serta sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika di wilayah tertentu. Hingga saat ini peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan tampaknya masih menjadi fokus utama pengembangan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang menjelaskan kondisi dan situasi pendidikan di wilayah Provinsi Gorontalo. Informasi tersebut digambarkan melalui pencapaian beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan indikator terkait lainnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) – Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut digambarkan dalam APK. Secara umum, tren

capaian APK di Provinsi Gorontalo bersifat fluktuatif sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah.



Sumber: BPS (diolah)

Kematangan pendidikan sejak usia dini sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dari berbagai aspek kecerdasan. Dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019), perkembangan APK PAUD/KB di Provinsi Gorontalo mengalami rata-rata peningkatan dan penurunan sebesar 1 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2017, APK PAUDmeningkat1.69 persen dari 48.54 persenmenjadi 50.23 persen di tahun 2018. Namun pada tahun 2019,APK PAUDmengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 49.49 persen.Diharapkan kedepannya kesadaran masyarakat terhadappentingnya PAUD dapat meningkat karena semakin tinggi partisipasi anak dalam PAUD akan semakin baik pula tingkat pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Pada sasaran peningkatan kualitas pendidikan dasar, capaian(APK) SD/MI/ sederajat di Provinsi Gorontalo memiliki tren yang cenderung meningkat. Berdasarkan data BPS, APK SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 adalah sebesar 110.88 persen. Capaian ini sedikit lebih rendah dari APK tahun 2018, namunmengalami peningkatan yang cukup signifikan dari APKtahun 2016 yaitu 108.34 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar batas usia 7-12 tahun. Adapunfaktor yang dapat menjadi penyebab tinggi APK pada jenjang SD antara lain banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar dengan usia terlalu dini (belum mencapai 7 tahun), siswa yang terlambat untuk mendaftar sekolah, sertaterdapatnya siswa yang mengulang kelas pada jenjang pendidikan tersebut.

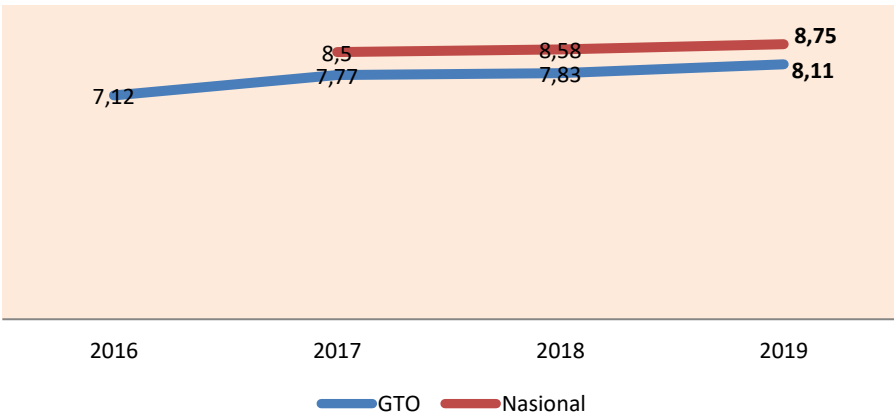
Untuk tingkat pendidikan menengah, APK SMP/MTs/ sederajat mengalami penurunan selama periode 2016-2019 dengan capaian masing-masing sebesar 83.71 di tahun 2016, 81.7 di tahun 2017, 80.17 di tahun 2018, dan 78.95 di tahun 2019.Sedangkan APK SMA/MA/ sederajat secara konsisten mengalami peningkatan sebesar 3.5 persen dalam tiga tahun terakhir (2017-2019). Pada tahun 2019, APK

SMA/MA/ sederajat tercatat sebesar 88.64 persen, meningkat dari tahun 2018 dengan APK sebesar 84.25 persen. APK SMA/MA/ sederajat pada tahun 2019 ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian APK nasional yaitu sebesar 83.98 persen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi rumah tangga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat pendidikan anggota dalam rumah tangga tersebut. Hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, akan semakin tinggi pula capaian APK anggota keluarganya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian APK yang semakin menurun dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat PT. Pada tahun 2019, APK PT Provinsi Gorontalo hanya sebesar 36.71 persen. Meskipun capaian ini diatas capaian nasional dengan APK sebesar 30.28 persen, namun tetap menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Disamping capaian APK, kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo diukur pula dengan indikator angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menggambarkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki oleh seseorang dimana semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/ tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Se jauh mana kemampuan masyarakat di Provinsi Gorontalo usia 15 tahun keatas mengenyam pendidikan di bangku sekolah dapat dilihat melalui indikator ini. Sejak tahun 2016, angka RLS Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, capaian angka RLS adalah sebesar 8.11 tahun dan berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 7.35 tahun. Angka RLS ini juga berhasil mendekati capaian nasional sebesar 8.75 tahun untuk periode yang sama. Dengan kata lain, RLS masyarakat Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 adalah sampai pada jenjang pendidikan SMP Kelas 2.

Grafik. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019



Sumber: BPS (diolah)

Sesuai dengan prinsip pengarusutamaan gender yang diusung dalamsalah satu target pencapaian SDGs, kesetaraan gender diperlukan dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan. Rasio APM digunakan untuk melihat sudah terpenuhi atau belum kesetaraan gender dalam aspek pendidikan. Tabel berikut memperlihatkan rasio APM pada masing-masing jenjang pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Tabel. Rasio APM di Provinsi Gorontalo, Tahun 2016 - 2019

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
SD/MI/Sederajat	%	100.94	99.44	100.89	101.11
SMP/MTs/Sederajat		114	106.09	113.43	103.18
SMA/MA/Sederajat		143.63	124.05	105.23	121.97

Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2019, rasio APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat, yaitu sebesar 101.11 persen. Angka ini semakin meningkat seiring semakin tingginya jenjang pendidikan dengan rasio APM SMP/MTs/ sederajat sebesar 103.18 persen dan jenjang SMA/MA/ sederajat sebesar 121.97 persen. Adapun nilai rasio APM mencapai 100 persen menunjukkan bahwa APM perempuan sama dengan APM laki-laki. Artinya, di Provinsi Gorontalo kesetaraan gender pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah berhasil diwujudkan.

Dari sisi kemampuan dasar, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk di suatu wilayah adalah persentase Angka Melek Aksara. Angka melek aksara merupakan salah satu indikator pencapaian SDGs yang menjamin bahwa semua remaja dan kelompok penduduk dewasa tertentu memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Gorontalo memiliki capaian yang cukup tinggi yaitu 99.86 persen di tahun 2019. Besaran capaian ini selain melampaui angka melek aksara nasional, juga dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 99.81 persen. Melalui pencapaian ini diharapkan kemampuan literasi masyarakat Provinsi Gorontalo semakin meningkat yang akan berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan capaian angka melek aksara untuk kelompok usia 15-59 tahun adalah sebesar 99.33 persen, masih sedikit dibawah target RPJMD. Hal ini kemungkinan karena adanya kelompok lanjut usia (lansia) yang sulit dijangkau dalam program-program keaksaraan.

Tabel. Capaian Angka Melek Aksara di Provinsi Gorontalo, Tahun 2017 - 2019

Indikator		Tahun		
		2017	2018	2019
Angka melek aksara	Prov. Gorontalo	99.73	99.84	99.86
15-24 tahun	Nasional	99.66	99.71	99.76
Angka melek aksara	Prov. Gorontalo	99.01	99.26	99.33

15-59 tahun	Nasional	97.93	98.07	98.22
-------------	----------	-------	-------	-------

Sumber: BPS (diolah)

Selain membaca dan menulis, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan membantu mengakselerasi pencapaian Tujuan 4 SDGs terlebih lagi dalam masa pandemi saat ini. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pola belajar mengajar di sekolah menjadi berubah dimana segala bentuk pembelajaran, komunikasi dan koordinasi dilakukan secara *daring*.Kemampuan literasi digital pun menjadi salah satu keahlian yang penting untuk dimiliki dalam pelaksanaan pola belajar digital atau online saat ini.Literasi digital berperan mengefektifkan interaksi dan komunikasi selama proses pembelajaran. Menurut data BPS, proporsi masyarakat usia 15-59 tahun yang memiliki keterampilan TIK di Privinsi Gorontalo masih cukup rendah yaitu 50.62 persen di tahun 2019.Hal ini tentunya akan berdampak pada kesiapan guru dalam mengajar secara *daring*serta kesiapan orang tua dalam memberikan pendampingan.Untuk kelompok usia 15-24 tahun yang umumnya didominasi oleh pelajar, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 79.6 persen yang telah memiliki keterampilan TIK.

Dalam kondisi ini, pemerintah didorong untuk membuat kebijakan terbaiknya dalam menyikapi sejumlah tantangan nyata yang dihadapi dalam transformasi pendidikan, diantaranya:

- 1) Ketimpangan teknologi antar sekolah dan antar wilayah dimana pada umumnya di wilayah perkotaan memiliki akses teknologi lebih baik dibandingkan dengan di wilayah pedesaan;
- 2) Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan, seperti internet dan kuota; dan
- 3) Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran.

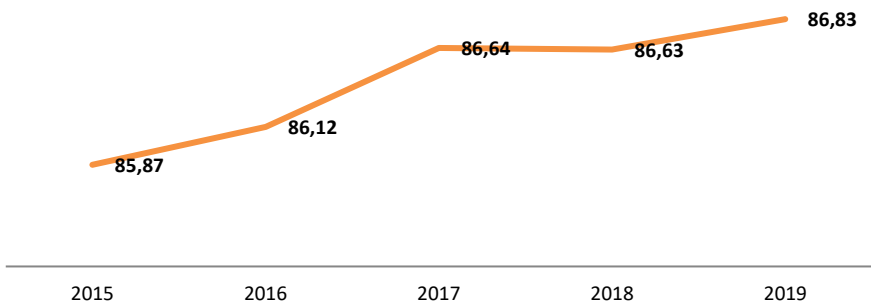
Pemerintah serta seluruh *stakeholder* dalam bidang pendidikan diharapkan mampu berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran agar peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar untuk semua masyarakat tetap dapat tercapai, khususnya di masa darurat pandemi Covid-19 saat ini.

TUJUAN 5. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender akan memperkuat kemampuan Provinsi Gorontalo untuk terus berkembang, mengurangi kemiskinan serta menjalankan roda pemerintahan secara lebih efektif. Mempromosikan kesetaraan gender perlu menjadi bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Capaian perbandingan antara pembangunan perempuan dan laki-laki salah satunya

tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2019, IPG Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dan berada pada angka 86.83, namun capaian ini masih jauh dibawah IPG nasional dengan nilai 91.07.

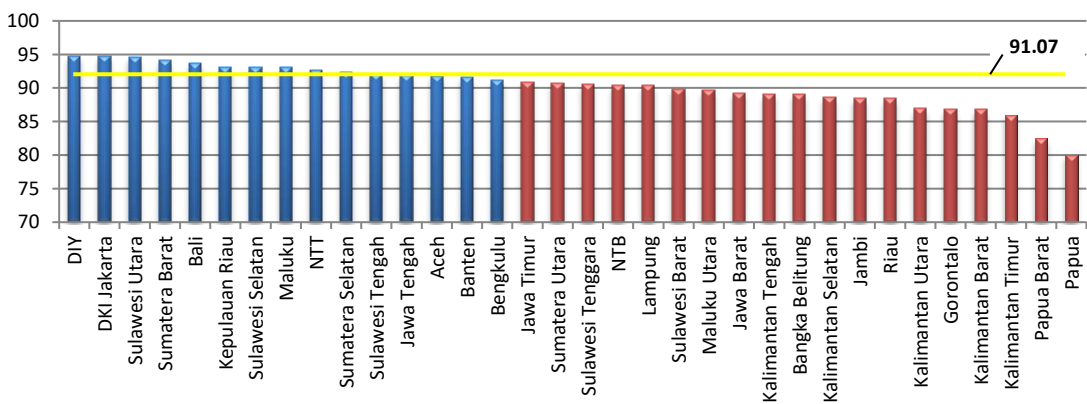
Grafik. Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Gorontalo, Tahun 2015-2019



Sumber: BPS (diolah)

Pada level nasional, Provinsi Gorontalo masuk kedalam kategori provinsi dengan IPG terendah. IPG tertinggi dicapai oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai 94.77, sedangkan IPG terendah dimiliki oleh Provinsi Papua dengan nilai 80.05.

Grafik. Indeks Pembangunan Gender per Provinsi, Tahun 2019



Sumber: BPS (diolah)

Secara keseluruhan, terdapat 19 provinsi yang memiliki IPG dibawah rata-rata nasional, dimana 5 provinsi dengan capaian IPG terendah berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia. Perbedaan capaian pembangunan manusia antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia masih menjadi masalah yang harus diselesaikan agar capaian pembangunan kedua wilayah dapat lebih berimbang.

Disamping capaian IPG, indikator kesetaraan gender dalam Tujuan 5 SDGs juga diukur melalui komposisi dan kontribusi perempuan di dunia politik. Pada periode 2019-2024, Provinsi Gorontalo memiliki 1 perwakilan perempuan di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan 2 perwakilan perempuan di kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Sedangkan proporsi perempuan yang duduk di

kursi DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk periode 2019-2024 adalah sebanyak 41 orang.

**Tabel. Eksistensi Perempuan dalam Lembaga DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun 2019**

No	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Perempuan	Jumlah Anggota Dewan	Persentase Partisipasi Perempuan
1	Provinsi Gorontalo	12	43	28%
2	Kota Gorontalo	7	25	28%
3	Kabupaten Gorontalo	6	36	17%
4	Kabupaten Bone Bolango	1	25	4%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	5	25	20%
6	Kabupaten Boalemo	6	25	24%
7	Kabupaten Pohuwato	4	25	16%
	TOTAL	41	204	20%

Sumber: Website DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota

Berdasarkan data diatas, persentase anggota perempuan dalam parlemen masih belum mencapai target kuota 30 persen sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Meskipun demikian, tren keterwakilan perempuan di parlemen yang cenderung meningkat memunculkan optimisme bahwa peran perempuan di bidang politik semakin nyata terlihat dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis. Salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender diwujudkan dengan penetapan program pengarusutamaan gender (PUG) yang dilaksanakan baik di level pusat maupun daerah. Pelaksanaan PUG diharapkan dapat meningkatkan capaian kesetaraan gender antarwilayah secara merata.

Tujuan 6

Tujuan global 6 (enam) memiliki fokus pada ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Adapun penjabaran dari tujuan keenam ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- b. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- c. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan

bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

- d. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- e. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- f. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

Sasaran global tersebut, belum semuanya dapat diukur di Provinsi Gorontalo. Berikut ini penjabaran status capaian untuk tujuan 6 (enam) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.

a. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Provinsi Gorontalo tahun 2019, capaian akses terhadap layanan air minum layak tercatat sudah mencapai 90,92% dari 69,91% tahun 2018. Diharapkan melalui program pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi, diantaranya : (1) Pamsimas-Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat); (2) PPSP-Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman); (3) DAK Air Minum dan Sanitasi, capaian ini bisa dipertahankan dan meningkat pada tahun berikutnya hingga bisa mencapai 100%.

b. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau

Kapasitas air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau di Provinsi Gorontalo belum tersedia data dari instansi terkait seperti Dinas PU dan PDAM. Khusus data dan informasi terkait prasarana penyediaan air baku dapat diperoleh pada masing-masing kabupaten/kota. Namun data dan informasi tersebut belum menjelaskan secara rinci, terutama penyediaan air baku untuk pulau-pulau belum ada datanya. Pada kenyataannya di masyarakat, penyediaan air baku belum mampu mengakomodir kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri bahkan untuk pulau-pulau. Belum lagi pencemaran yang akan ditimbulkan di semua sumber air baku terutama air permukaan yang fungsinya mengalirkan segala jenis buangan cair, dan sampah yang berasal dari sungai Bone atau sungai-sungai lainnya yang menjadi sumber air utama masyarakat untuk kebutuhan air baku. Sumber-sumber air permukaan yang berpotensi tercemar adalah sungai bagian hilir dengan

daerah tangkapan penggunaan lahan untuk permukiman dan prasarana kota.

c. Meningkatkan akses terhadap sanitasi yang layak

Pada 2018, indikator yang digunakan adalah persentase cakupan rumah tangga yang menggunakan jamban sehat. Capaian permukiman yang telah memiliki jamban sehat sebesar 42,81%. Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi yang indikatornya adalah jumlah jiwa yang terlayani sanitasi sebesar 60,57%. Upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih relatif sudah cukup memadai. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut diperoleh melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi serta prasarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Namun, dalam penjabaran target indikator SDGs, beberapa kegiatan tersebut belum dihitung, sehingga diperlukan penyesuaian dan pengembangan indikator tersebut untuk menjadi indikator SDGs.

d. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Indikator yang digunakan pada sasaran ini adalah cakupan desa/kelurahan yang telah melaksanakan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Desa yg melaksanakan 5 pilar STBM baru 3 desa/kelurahan, yaitu 2 kelurahan di Kota Gorontalo & 1 desa di Kabupaten Boalemo.

e. Terbangunnya Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan, Komunal

Indikator jumlah kabupaten/kotayang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal di Provinsi Gorontalo belum tersedia data dari instansi terkait.

f. Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

Indikator kualitas air danau dan sungai adalah melakukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemantauan kualitas air danau di Provinsi Gorontalo adalah danau Limboto, dimana indikator kualitas air danau Limboto sudah mencapai target 100%. Sedangkan indikator kualitas air sungai sebagai sumber air baku tahun 2019 hanya mencapai 10 dari 25 sungai (40%).

g. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat

Dari 5 indikator hanya ada 1 indikator yang mencapai target SDGs, yaitu target jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau, dimana indikator kegiatannya adalah jumlah kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan sempadan sungai yang ditingkatkan kapasitasnya ada 2. Sedangkan jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi, dari database Balai Wilayah Sungai dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Gorontalo menunjukkan dari jumlah 91 sejak 2016 sampai tahun 2019 belum ada peningkatan jumlah stasiun tersebut. Sementara itu, untuk memulihkan kawasan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pengembangan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama air. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (2018) dan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Bone Bolango (BPDAS-HL) menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan pengembangan kawasan hutan yang semula di tahun 2018 seluas 3,950 Ha dan direncanakan bisa mencapai luasan 4,250 Ha di tahun 2021 (DLHK, 2018). Namun, sampai tahun 2019 belum mencapai target. Wilayah Sungai memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat disekitarnya, terutama dalam bidang sosial ekonomi yang cukup luas diperuntukan bagi penyediaan Sumber Daya Air dan juga memiliki potensi geografis yang strategis untuk dikembangkan. Namun sampai tahun 2019, indikator tersebut belum tercapai. Penataan kelembagaan sumber daya air juga perlu dilakukan pemerintah melalui sinergitas pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta konsisten menjalankannya. Juga perlu untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang dibentuk melalui Balai Wilayah Sungai Provinsi Gorontalo.

h. Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau

Dari 4 indikator ini ada 3 indikator yang mencapai target SDGs yaitu jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya, jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%, dan jumlah danau yang menurun tingkat erosinya. Artinya ada 75% pada indikator ini yang mencapai target SDGs.

Tahun 2019 indikator yang mencapai target SDG pada tujuan 6 (enam) sebesar 52,38% meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar 19,05%.

Tujuan 7

Tujuan 7 untuk menjamin akses terhadap energi yang terjangkau. Dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Mengapa SDGs tujuan 7 penting bagi pemerintah daerah? Pemerintah daerah memiliki posisi terbaik untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan terkait akses terhadap energi yang terjangkau bagi kelompok rentan di dalam masyarakat. Pemerintah daerah dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan efisiensi energi dengan ber-

investasi dalam gedung-gedung hemat energi dan sumber energi terbarukan untuk fasilitas publik. Di perkotaan, transportasi umum dan kebijakan perencanaan kota, serta teknologi 'smart city' baru dapat memberikan dampak yang signifikan bagi efisiensi energi dan emisi karbon.

Target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2030, menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern.
2. Pada tahun 2030, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia.
3. Pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia.

Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Pada target 7.1 terdiri dari 2 (dua) indikator dan kedua indikator telah mencapai target dari SDGs. Rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo secara pasti mengalami peningkatan per tahun. Pada tahun 2019, rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo mencapai 98 persen (PLN, berita online). Rasio ini meningkat dibandingkan dengan kondisi di tahun 2016 yang sebesar 96, 87%.

Indikator lain yang mengalami peningkatan adalah konsumsi listrik per kapita. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS dapat dihitung konsumsi listrik per kapita di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 452,09 kWh. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 386,34 kWh

Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.

Pada target 7.2 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Bauran energi terbarukan, indikator tersebut sudah mencapai target SDGs yakni 10162 kWh. Besaran energi terbarukan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 8520 kWh.

Tujuan 8

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Pemerintah daerah dapat menghasilkan pertumbuhan dan pekerjaan dari bawah melalui pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat mencegah adanya pekerja anak, dan mengupayakan agar mereka dapat mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan sektor informal untuk meningkatkan kesehatan kerja dan perlindungan sosial serta mendorong pembentukan usaha mikro, kecil dan menengah bilamana memungkinkan.

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta menjamin kesetaraan upah pekerja antar gender untuk pekerjaan yang sama. Pemerintah daerah juga dapat menyertakan praktik ini sebagai bagian dari kriteria pengadaan ketika bekerja dengan sektor swasta. Pemerintah daerah berada pada posisi yang strategis untuk

menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam menentukan biaya dan keuntungan dari pengembangan pariwisata serta mengembangkan rencana dan strategi untuk memastikan kegiatan di sektor ini berkelanjutan.

Target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Memajukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif. Penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan.
2. Pada tahun 2030, mencapai penyerapan ketenagakerjaan yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk pemuda dan penyandang disabilitas, serta kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai setara.
3. Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, berpendidikan atau terlatih
4. Segera mengambil langkah-langkah untuk melarang dan menghilangkan penyerapan tenaga kerja anak-anak, mengentaskan kerja paksa, dan mengakhiri segala bentuk penyerapan tenaga kerja anak termasuk pengerahan dan pemanfaatan tentara anak-anak pada tahun 2025
5. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan, imigran dan pekerja tidak tetap.
6. Pada tahun 2030, merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung budaya dan produk lokal

Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Target 8.1 terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu laju pertumbuhan PDB perkapita dan PDB perkapita. Untuk besaran PDB perkapita tahun 2019 adalah sebesar 34,21 juta rupiah. Nilai ini mengalami lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi baseline (2016) yang hanya sebesar 27,65 juta rupiah. Dilihat dari sisi pertumbuhan, peningkatan PDRB per kapita pada tahun 2019 ini hanya sebesar 5,74%(ADHB). Pertumbuhan PDRB per kapita ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2016 yang mencapai 9,81%. Melihat hal ini, target capaian dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita belum maksimal. Telah disebutkan bahwa setidaknya pertumbuhan produk domestik bruto per tahun adalah 7%, maka pemerintah terkait sebaiknya lebih memaksimalkan usaha-usaha dalam mewujudkan targetnya.

Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

Indikator yang sesuai dengan kondisi daerah pada target ini adalah laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan riil per orang bekerja per tahun. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat produktivitas tenaga

kerja di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai rasio ini di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 adalah sebesar 5,16% (ADHK).

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Pada target 8.3 ini, terdapat 3 indikator yang dapat diukur di provinsi Gorontalo, yakni :

- 1) Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh menunjukkan secara keseluruhan, proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian pada tahun 2019 adalah sebesar 4,04%. Proporsi ini mengalami penurunan hampir separuhnya dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 8,54%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi laki-laki yang bekerja secara informal di sektor non-pertanian mencapai 3,44% sedangkan perempuan sebesar 0,6%.
- 2) Persentase tenaga kerja formal. Rasio persentase tenaga kerja formal pada tahun 2019 mencapai 18.06%
- 3) Persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian. Rasio ini pada tahun 2019 sebesar 5,17%. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 10,56%.

Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pada target 8.5 ini, dari empat indikator yang bersesuaian dengan kondisi daerah, hanya dua indikator yang datanya tersedia yakni persentase setengah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka. Sementara dua indikator yang datanya tidak tersedia adalah : upah rata-rata per jam pekerja dan persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

Untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 mencapai 4.06%. Nilai ini lebih tinggi dari target RPJMD yakni sebesar 3.65%. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah Provinsi Gorontalo mengingat jangka waktu periode RPJMD yang akan berakhir pada tahun 2022 sehingga jika tidak ditangani secara serius akan membuat pencapaian target ini dalam RPJMD tidak akan terpenuhi.

Untuk persentase setengah pengangguran, data yang ada menunjukkan persentase setengah pengangguran di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 sebesar 13,1%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun dasar/baseline (2016) yang mencapai 28,35%.

Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Target 8.8 terdiri dari 2 (dua) indikator, dari 2 (dua) indikator tersebut yang telah mencapai target SDGs adalah Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Pada indikator lainnya yakni Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sector pekerjaan dan status migran, bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja fatal maupun non fatal seperti yang telah disebutkan, yang menandakan bahwa target capaian dalam indikator ini berhasil dicapai, patut di apresiasi dan dijadikan acuan oleh indikator-indikator lainnya dalam segi pencapaiannya, mengingat banyaknya angkatan kerja yang telah bekerja menurut data dalam angka 2020 di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 562.087 tenaga kerja dari total angkatan kerja 585.896 orang atau dalam persentasenya sebesar 95% .

Pada Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Target 8.9 ada 3 (tiga) indikator yaitu jumlah wisatawan mancanegara melebihi target SDGs dengan capaian 6.856, dan untuk indikator selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara melebihi target dengan capaian 655.672. Jumlah kunjungan yang melebihi target SDGs dari kedua indikator diatas merupakan suatu langkah yang baik dalam memajukan sector pariwisata di Provinsi Gorontalo. Namun untuk kedepannya untuk sector pariwisata ini dapat lebih di maksimalkan dan diperhatikan lebih baik lagi oleh pemerintah mengingat bahwa sector pariwisata dapat menjadi sector yang paling berpengaruh dan memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian di daerah-daerah pada umumnya, termasuk di Provinsi Gorontalo.

Ada beberapa target dan indikator yang tidak dijelaskan dikarenakan data yang belum ditemukan.

Tujuan 9

Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia dan membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Pemerintah daerah kawasan metropolitan khususnya sangat berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang melayani kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan bisnis start-up sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal, dengan mempertimbangkan pasar, kebutuhan, dan sumber daya lokal. Pemerintah daerah dapat menemukan kesenjangan terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk menjembatannya, khususnya melalui penyediaan ruang publik seperti perpustakaan.

Target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua.

2. Meningkatkan akses industri rumah tangga dan usaha skala kecil lainnya terhadap layanan pendanaan seperti kredit yang terjangkau dan menggabungkan mereka ke dalam pasar dan rantai nilai.
3. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan dan berupaya untuk menyediakan akses internet yang terjangkau dan universal di Negara-negara terbelakang tahun 2020.

Pada Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Target 9.1 terdapat 7 (tujuh) indikator, ada beberapa indikator yang telah mencapai target SDGs pada tahun 2019 yaitu kondisi mantap jalan nasional, jumlah bandara, jumlah dermaga penyeberangan, dan jumlah pelabuhan strategis. Sementara indikator pada target 9.1 belum ditemukan datanya yakni Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.

Pada Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Indikator pada target 9.3 ini yang bersesuaian dengan kondisi daerah adalah proporsi nilai tambah industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita ; laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur ; dan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Dari tiga indikator tersebut, satu indikator tidak memiliki data yakni proporsi nilai tambah industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita.

Untuk laju pertumbuhan industri manufaktur, pada tahun 2019 mencapai 11,62%. Nilai ini meningkat hampir dua kali lebih cepat dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang hanya sebesar 11,62%.

Untuk proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur pada tahun 2019 mencapai 10,33%. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang mencapai 16,06%.

Pada Target 9.c. Secara Signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Indikator pada target 9.c ini yang bersesuaian dengan kondisi daerah adalah proporsi penduduk yang terlayani dengan mobile broadband ; proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam ; dan proporsi individu yang menggunakan internet.

Indikator proporsi penduduk yang terlayani dengan mobile broadband pada tahun 2019 sebesar 41,78%. Proporsi ini meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi baseline yang sebesar 19,63%

Indikator proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada tahun 2019 sebesar 60,36%. Proporsi ini meningkat dibandingkan dengan kondisi baseline yang sebesar 52,93%

Indikator proporsi individu yang menggunakan internet pada tahun 2019 sebesar 41,78%. Proporsi ini meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi baseline yang sebesar 21,48%

Tujuan 10

Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara Negara-negara. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dalam suatu negara. Penyaluran sumber daya kepada pemerintah daerah di kawasan-kawasan yang paling membutuhkan menjadi sangat krusial, begitu pula dengan meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dan pengasingan. Pemerintah daerah memiliki peranan khusus dalam meningkatkan inklusitas di tingkat daerah. Pemerintah dapat mendorong partisipasi kelompok minoritas dalam proses konsultasi publik dan pemilihan umum.

Pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di dalam lembaga-lembaga dan praktik kerja pemerintahan, serta menjadikannya sebagai kriteria pengadaan barang dan jasa publik. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk tidak mendiskriminasi dalam menyediakan pelayanan umum. Pemerintah daerah dapat menerapkan pajak progresif sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskalnya dan mengalokasikan anggaran daerah untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi rumah tangga termiskin di masyarakat.

Target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan menjaga pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah dengan tingkat di atas rata-rata nasional.
2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial atau status lainnya.
3. Menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan menghilangkan peraturan kebijakan dan praktik yang mendiskriminasi serta mendorong adanya legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut.
4. Mengangkat kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan secara progresif mencapai kesetaraan.
5. Memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Pada target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Ada beberapa indikator pada target 10.1, dan dari 7 (tujuh) indikator hanya ada 1 (satu) indikator yang mencapai target dari SDGs yaitu Jumlah Desa Mandiri. Sementara untuk indikator lainnya koefisien gini, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dan jumlah daerah tertinggal belum mencapai target yang telah direncanakan. Untuk 3 (tiga) indikator lain belum ditemukan data. Melihat banyaknya indikator yang belum mencapai target capaian berarti bahwa pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi dalam mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk. Melihat capaian koefisien/indeks gini di provinsi Gorontalo yang lebih baik dibandingkan target capaian SDGs ini maka tidak menutup kemungkinan hasil daripada indikator lainnya yang mengikuti akan sama baiknya dengan hasil indeks tersebut. Diperlukan perbaikan secara menyeluruh dan signifikan lagi mengingat daerah Gorontalo sudah cukup lama berada dalam ketertinggalan.

Beberapa target dan indikator lainnya belum ditemukan data ataupun ada beberapa yang belum memenuhi target capaian SDGs.

Tujuan 11

Tujuan global 11(sebelas) memiliki fokus menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dari 6 indikator belum ada 1 (satu) indikator yang mencapai target SDGs. Adapun penjabaran dari tujuan kesebelas ini adalah sebagai berikut:

a. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia

Indikator ini belum mencapai target SDGs, karena di Provinsi Gorontalo belum ada 1 lokasi yang dikhususkan sebagai kota pusaka, sehingga target ini belum tercapai. Namun, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Provinsi Gorontalo memiliki Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk kepentingan Sosial Budaya, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan budaya dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. KSP dari kepentingan Sosial Budaya meliputi: (1) Kota Pendidikan Gorontalo, kawasan pendidikan Kabila-Suwawa di Kabupaten Bone Bolango dan kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo; (2) Kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya Telaga-Gorontalo-Tapa.

b. Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

Dari 2 (dua) indikator ini belum ada yang mencapai target SDGs. Berdasarkan data laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di wilayah Provinsi Gorontalo belum ada Kota Tangguh Bencana. Namun untuk program pembentukan Desa Tangguh Bencana, di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2020 sudah ada 5 desa yang difasilitasi menjadi

desa Tangguh bencana dari target 100 desa (16.67%. Sebelumnya pada tahun 2018 dua desa yang difasilitasi menjadi desa Tangguh bencana yakni Desa Hutakalo Kecamatan Sumalata dan Desa Mokonuwu Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.

Provinsi Gorontalo juga telah memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dalam RPJMD 2017-2022. Namun dalam implementasinya di lapangan, masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah seharusnya lebih memperkuat instansi terkait, organisasi non pemerintah, universitas, dan masyarakat untuk berperan aktif dan bekerjasama mulai tahap pra bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan) hingga saat bencana (tanggap darurat), mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana selalu lebih besar dari anggaran penanggulangannya.

c. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota

Indikator ini juga belum mencapai target SDGs hingga tahun 2019. Padahal persoalan sampah merupakan salah satu yang sangat krusial dalam pembangunan di provinsi Gorontalo. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah provinsi Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dimana pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan dan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Di beberapa kabupaten/kota, para pembuat kebijakan sudah menginisiasi kebijakan dan strategi dalam penanganan dampak lingkungan perkotaan, misalnya di Kota Gorontalo dalam pengelolaan limbah, pemerintah membuat program pengelolaan bank sampah, namun belum mampu mengurangi volume dan timbunan sampah di Kota Gorontalo. Selain itu, program terkait pencemaran udara juga dilakukan melalui kegiatan monitoring kualitas udara, blue sky program, dan car free day. Namun dalam pelaksanaannya di masing-masing kabupaten/kota masih belum optimal. Diharapkan kebijakan ini tidak hanya dibuat, tetapi harus terus dijalankan secara konsisten, sehingga indikator ini bisa dicapai pada tahun berikutnya.

d. Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas

Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi suatu kota yang memiliki fungsi ekologis terutama untuk mengontrol iklim mikro di wilayah perkotaan. Indikator ini belum mencapai target SDGs, karena proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo masih dibawah dari 30%. Idealnya proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota paling sedikit sebesar 30% dari total luas kota.

Tahun 2019 indikator yang mencapai target SDG pada tujuan 11 (sebelas) sebesar 16,67% dibandingkan pada tahun 2018 belum ada indikator yang tercapai (00,00%).

Tujuan 12

Tujuan global 12(dua belas) memiliki fokus menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dari 1 (satu) indikator tersebut belum mencapai target SDGs. Berdasarkan data evaluasi RENSTRA dan RENJA DLHK Provinsi Gorontalo tahun 2019, indikator yang mencakup tujuan 12 ini hanya persentase kinerja (pembinaan dan pengawasaan) pengelolaan limbah B3, dari target 75% yang tercapai sudah 70% (93%) terealisasi.

Pada tahun 2017, jumlah limbah B3 yang dikelola per sektor yaitu PEM (91,30%), Prasarana (6,03%), Manufaktur (2,01%), dan Agro Industri (0,65%). Sedangkan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) yaitu 82%. Namun pada tahun 2019 data ini belum tersedia. Ada 2 (dua) kemungkinan yang mengindikasikan hal tersebut, yaitu data terkait jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) belum dipublikasikan atau kebijakan pemerintah dalam mengelola limbah B3 sejak tahun 2018 hingga saat ini belum menjadi prioritas.

Tahun 2019 indikator yang mencapai target SDG pada tujuan 12 (dua belas) masih sama dengan tahun 2018 yaitu (00,00%).

Tujuan 13

Tujuan global 13(tiga belas) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Indikator pada tujuan 13 ini yaitu adanya dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia, tahun 2019 belum mencapai target SDGs, dibandingkan tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo mengeluarkan laporan inventarisasi dan verifikasi emisi GRK dalam dokumen Biennial Update Report (BUR).

Salah satu isu strategis bidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selama periode 2017-2022 adalah perubahan iklim dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini untuk menselaraskan dengan tujuan dan komitmen pemerintah untuk penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional sebesar 29% pada tahun 2030. Diharapkan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa diakomodir ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah (RPJMD Provinsi Gorontalo) ke depannya.

Tahun 2019 indikator yang mencapai target SDG pada tujuan 13 (tiga belas) masih sama dengan tahun 2018 yaitu (00,00%).

Tujuan 14

Tujuan global 14(empat belas)melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dari 5 indikator kesemuanya sudah mencapai target SDGs. Adapun penjabaran dari tujuan empat belas ini adalah sebagai berikut:

- a. Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia**

Berdasarkan penelusuran dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Gorontalo tahun 2019, data jumlah luas kawasan konservasi perairan, dari target 1.130 hektar, jumlah capaian sebanyak 2.261,27 hektar, artinya luas kawasan konservasi perairan di tahun 2019 melebihi target. Pada tahun 2018 melalui dokumen Renstra 2018-2020, jumlah luas kawasan konservasi perairan dari target 11.948,7 hektar, jumlah capaian sebanyak 41.610 hektar, artinya luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Gorontalo bertambah. Namun masih diperlukan pengaturan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang memperhatikan kelestarian lingkungan (penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan melestarikan mangrove) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization**

Berdasarkan penelusuran indikator pada RENSTRA Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo, persentase kepatuhan pelaku usaha sudah mencapai target SDGs.

- c. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar**

Tiga indikator ini sudah mencapai target SDGs. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang mengakui dan melindungi hak akses nelayan terhadap perikanan skala kecil, yang tercakup dalam beberapa peraturan, diantaranya yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 83/24/II/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal (Satgas *Illegal Fishing*); Pergub Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Tarif Penjualan Unit Usaha Pabrik Es pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo; Surat Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Kegiatan Seksi

Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tingkat Provinsi Gorontalo; dan PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (RPZKKPD).

Selain itu, peningkatan akses pendanaan usaha nelayan juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya pemberian akses ke lembaga keuangan dan perbankan bagi nelayan skala kecil dilakukan melalui pengembangan skema pinjaman kredit yang sesuai untuk nelayan skala kecil. Selain itu untuk memberdayakan nelayan, pemerintah membuat program Bina Kelompok Perikanan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah berupaya untuk memberdayakan nelayan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan manajemen usaha nelayan skala kecil antara lain: (1) program pendampingan dan pembinaan manajemen usaha; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil; dan (3) pengembangan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui program *science and tecno-park* (STP) guna meningkatkan akses teknologi dan informasi.

Tahun 2019 indikator yang mencapai target SDG pada tujuan 14 (empat belas) sebesar 80,00% menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan data tahun 2019 pada indikator jumlah nelayan yang terlindungi belum tersedia datanya.

Tujuan 15

Tujuan global 15(lima belas)melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dari 9 (sembilan) indikator tersebut hanya ada 4 indikator yang mencapai target SDGs. Adapun penjabaran dari tujuan lima belas ini adalah sebagai berikut:

- a. **Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional**

Berdasarkan penelusuran indikator pada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, data kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan, dari target 63, jumlah capaian sebanyak 64, artinya angka tersebut menunjukkan luas kawasan hutan bertambah dari luas lahan secara keseluruhan.

- b. **Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang**

terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global

Dari 3 (tiga) indikator tersebut, hanya 2 yang mencapai target SDGs yaitu jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan dan data proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan yang diperoleh dari data lahan kritis DLHK 2018 dan Statistik Kehutanan 2019. Tahun 2018 luas lahan kritis sebanyak 283.648,80 hektar, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 631.200 hektar, artinya luas lahan kritis bertambah. Sementara pada indikator luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya dari angka 994,62 hektar tahun 2018 hingga tahun 2019, capaian target masih 0 (nol).

c. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur berkurangnya lahan kritis adalah berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas. Berdasarkan laporan dari BPDASHL, proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dari target 335.341 hektar, evaluasi jumlah capaian masih 13.150 hektar (3,92%).

Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pengelolaan kehutanan adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan dan lahan untuk kepentingan non kehutanan, baik berupa alih fungsi lahan, perambahan hutan, pencurian kayu (*illegal logging*), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang, isu perubahan iklim serta rendahnya pemanfaatan nilai hasil hutan non kayu.

d. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal

Dari 3 (tiga) indikator tersebut, hanya 1 yang mencapai target SDGs yaitu persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. Data tersebut diperoleh dari Statistik KLHK yaitu sebesar 116% yang tercapai di tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 ada 5 kasus laporan penyelesaian tindak pidana LHK yang diperoleh dari dokumen evaluasi Renja DLHK tahun 2019.

Data lainnya yang tersedia melalui BPS Provinsi Gorontalo (2017), persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi menurut tipologi tindak pidana yaitu pembalakan liar (49%), perambahan hutan (6%), peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal (41%), pencemaran lingkungan (3%), dan kebakaran hutan dan lahan (1%).

Sementara proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap, dan jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi, capaian target masih 0 (nol). Pemerintah melalui kebijakan dan strategi, perlu menyusun program dan kegiatan yang difokuskan pada penindakan tegas bagi pelaku pembalakan liar, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) illegal, karena aktivitas ini masih marak terjadi di Provinsi Gorontalo, sehingga indikator pembangunan berkelanjutan pada target ini bisa tercapai pada tahun 2020.

e. Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan

Dari 1 (satu) indikator tersebut yaitu bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan capaiannya masih 0 (nol) karena belum ada datanya.

Tahun 2019 indikator yang mencapai target SDG pada tujuan 15 (lima belas) hanya sebesar 33,33% masih sama dengan pencapaian target pada tahun 2018. Namun berbeda dengan data yang disajikan pada tahun 2018, di tahun 2019 pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan lingkungan khusus pada indikator proporsiluas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhanmenunjukkan angka 6,97%. Walaupun angka ini masih sangat kecil, namun pemerintah telah berupaya melalui BPDASHL Bone Bolango, DLHK Provinsi dan KPH untuk memulihkan lahan kritis di Provinsi Gorontalo.

Hasil telaah pilar lingkungan mengungkapkan bahwa dari 43 indikator yaitu tujuan 6 (21 indikator), tujuan 11 (6 indikator), tujuan 12 (1 indikator), tujuan 13 (1 indikator), tujuan 14 (5 indikator), dan tujuan 15 (9 indikator), baru 19 indikator (44,19%) yang mencapai target SDGs.

Namun dari 19 indikator tersebut, yang indikatornya bisa terukur dengan jelas baru 16 indikator (37,21%), indikator yang perlu dibuat lebih spesifik 3 indikator (6,98%), dan indikator yang membutuhkan perhatian lebih dan kerja keras perbaikan yang lebih baik sebanyak 24 indikator (55,81%). Penjabaran indikator tersebut disajikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Penjabaran Indikator Pencapaian SDGs dalam Pilar Pembangunan Lingkungan

No	Target Indikator SDGs	Mencapai target	Perlu dibuat spesifik
1	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	-
2	pengelolaan air	Proporsi populasi yang memiliki	-

	bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	
3		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	-
4		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	-
5		Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	-
6		Kualitas air danau	-
7		-	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
8		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	
9		Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	
10		Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	
11		Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	
12	Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	-	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
13	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara	-	Jumlah luas kawasan konservasi perairan
14	Berkelanjutan	Persentase kepatuhan pelaku usaha	
15	Sumberdaya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	
16	Berkelanjutan	Jumlah Provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	
17	TUJUAN 15. Pelestarian dan	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	
18	Pemanfaatan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
19	Berkelanjutan Ekosistem Daratan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	

➤ **Tantangan dan Pembelajaran**

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan, yaitu kurang sinergitas antara pilar ekonomi dan sosial. Padahal ekonomi tidak terlepas dari lingkungan, misalnya pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang mengusahakan lahan dan air untuk menghasilkan komoditas pangan, perkebunan, ternak, dan ikan. Sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja paling besar, jika pola

usaha pertanian yang dipraktekkan tidak ramah lingkungan (misalnya menggunakan pupuk kimia berlebihan) maka akan berdampak pada kualitas tanah yang kurang subur, sehingga produktifitas hasil pertanian akan menurun yang berdampak pada pendapatan petani serta kelebihan pupuk kimia di dalam tanah akan terserap ke hasil pertanian dan berakibat pada kesehatan konsumen.

Tantangan lainnya adalah persoalan sampah perkotaan, misalnya masih tingginya budaya konsumtif masyarakat, partisipasi masyarakat dalam mendorong pengembangan kota hijau masih kurang (program Reduce, Reuse, Recycle), serta belum konsistennya pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dan atribut kota hijau, sehingga volume dan timbulan sampah perkotaan masih menjadi tantangan kita bersama.

Selain itu, tantangan yang dihadapi saat ini adalah akibat pandemic global Covid-19. Dari sisi lingkungan, pandemic covid-19 justru membawa dampak positif yakni berkurangnya emisi akibat pembatasan aktivitas manusia di seluruh Indonesia (PSBB dan pembatasan pergerakan/physical distancing, serta kegiatan ekonomi pada umumnya yang menurun.

Dalam perencanaan pemerintah, belum konsisten dalam penetapan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah disepakati, belum dilakukan perhitungan besaran kisaran anggaran yang akan digunakan untuk pencapaian target kegiatan dan program, beberapa kegiatan belum selaras dengan kegiatan pusat, serta kurangnya dukungan fasilitas dari instansi pemerintah untuk staf lapangan terutama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

➤ **Arah Kebijakan dan Strategi**

Pilar pembangunan lingkungan meliputi 6 (enam) tujuan yaitu air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Sebagaimana arah kebijakan pada pilar lingkungan tahun sebelumnya, kebijakan pemerintah pada tahun mendatang masih berfokus pada pengembangan program-program yang telah dilaksanakan dan beberapa telah menunjukkan keberhasilan pada tahun 2019.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target pada pilar pembangunan lingkungan, RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 diarahkan pada beberapa kebijakan yang disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel. Tujuan dan Arah Kebijakan Provinsi Gorontalo pada Pilar Pembangunan Lingkungan

Tujuan	Arah Kebijakan dan Strategi Daerah
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui: <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air Penurunan beban pencemaran dari limbah domestik Peningkatan mutu dan kelas air Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kab/kota layak anak
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui: <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air Penurunan beban pencemaran dari limbah domestik Peningkatan mutu dan kelas air Pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk) Revitalisasi danau Limboto Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca Peningkatan tutupan lahan/hutan
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH Pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (<i>forest cover</i>) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau Pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sempadan sungai, danau, dan pantai
Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui: <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air Penurunan beban pencemaran dari limbah domestik Peningkatan mutu dan kelas air Pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk) Revitalisasi danau Limboto Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan
TUJUAN 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pola Ruang dengan Kebijakan pengembangan kawasan lindung, melalui: <ol style="list-style-type: none"> Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah Pengendalian kegiatan yang berpotensi

	<p>menimbulkan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>c. Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan 3. Penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung 4. Pelestarian ekosistem dan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau 5. Kebijakan membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi 6. Kebijakan meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan 7. Kebijakan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan 8. Kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan
--	--

Tujuan 16

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Dari data 5 tahun terakhir Jumlah kasus kejahatan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2017 dari jumlah 5.336 Kasus yang terjadi di tahun 2016. Namun dapat dilihat di Tahun 2018 terjadi sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya dengan total jumlah kasus yaitu 4.406 kasus. Kondisi ini menjadi perhatian khususnya terkait dengan tingkat keamanan dan kerawanan bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tren jumlah kasus yang mengalami penurunan dan kenaikan di tahun 2018. selanjutnya dengan adanya program/kegiatan yang dilaksanakan demi menekan angka kekerasan di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 yakni 4.406 kasus.

**Jumlah Kejahatan yang dilaporkan berdasarkan kabupaten se-Provinsi
Gorontalo**

Kepolisian Resort <i>Departmental (Resort)Police office</i>	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan/ Crime Total		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Polres Boalemo	495	459	510
Polres Gorontalo	1.431	1.148	1.195
Polres Pohuwato	535	603	615
Polres Bone Bolango	805	653	568
Polres Kota Gorontalo	1.837	1.168	1.228
Polda Gorontalo	233	284	290
Jumlah/Total	5.336	4.315	4.406

Sumber data : BPS Provinsi Gorontalo

Membangun Kelembagaan yang Tangguh. Berdasarkan RAN TPB/SDG’s, secara umum upaya untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat antara lain tergambarkan oleh capaian-capaian yang terjadi pada : Perilaku anti korupsi di Indonesia; Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah;Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin se provinsi Gorontalo sebanyak 5.868 dengan jumlah PNS perempuan lebih banyak daripada PNS laki-laki.

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Provinsi Gorontalo, Desember 2018 dan desember 2019**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Boalemo	1.217	1.905	3.122
Gorontalo	1.786	3.506	5.292
Pohuwato	1.280	2.361	3.641

Bone Bolango	1.262	2.532	3.794
Gorontalo Utara	852	1.439	2.291
Kota Gorontalo	1.426	2.889	4.315
Provinsi Gorontalo	2.636	3.232	5.868

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-laki <i>Male</i>	2019 Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Boalemo	1.218	1.985	3.203
Gorontalo	1.731	3.491	5.222
Pohuwato	1.493	2.109	3.602
Bone Bolango	1.276	2.665	3.941
Gorontalo Utara	909	1.589	2.498
Kota Gorontalo	1.364	2.790	4.154
Provinsi Gorontalo	2.569	3.233	5.802

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, Desember 2019

Jabatan <i>Occupation</i>	Laki-laki <i>Male</i>	2019 Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu <i>Specific Functional</i>	1.206	1.933	3.139
Fungsional Umum <i>Staf General Functional</i>	983	1.040	2.023
Struktural/ <i>structural</i>	380	260	640
Eselon V/5 th Echelon	-	-	-

Eselon IV/4 th Echelon	245	207	452
Eselon III/3 th Echelon	109	47	156
Eselon II/2 th Echelon	25	6	31
Eselon I/1 th Echelon	1	-	1
Jumlah/Total	2.569	3.233	5.802

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat kesenjangan jumlah ASN perempuan yang menempati posisi jabatan tertentu dan berdasarkan pangkat/eselonisasi jumlah perempuan hanya sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

Tujuan 17

Tujuan ini berbicara tentang bekerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan Agenda Pasca-2015 yang telah disetujui. Memperkuat perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pendapatan dan pajak daerah. Pada tingkat daerahlah kebijakan yang jelas dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani.

Pemerintah daerah telah berkolaborasi secara internasional selama lebih dari seratus tahun sebagai bagian dari gerakan pemerintah daerah internasional. Pemerintah daerah siap dan bersedia untuk berpartisipasi dalam kancah global. Data-data daerah yang dapat diandalkan akan menjadi sarana penting dalam memantau kemajuan pada tingkat sub-nasional dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

Target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat pergerakan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui bantuan luar negeri untuk Negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas Negara terkait pengumpulan pajak dan sumber pendapatan lainnya.
2. Meningkatkan koherensi kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan kerjasama multi-stakeholder yang dapat menggerakkan dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua Negara, khususnya Negara berkembang.
4. Mendorong dan mendukung kerjasama efektif antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang dipupuk dari pengalaman dan strategi dalam bekerjasama.

5. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas Negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketersediaan data yang berkualitas tepat waktu dan dapat diandalkan yang terpisahkan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status kependudukan, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks Negara.
6. Pada tahun 2030 mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di Negara-negara berkembang.

Pada target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Target 17.1 ada 3 (tiga) indikator, yakni Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ; Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; dan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Untuk indikator total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB mencapai 4,71%. Ini berarti rasio pendapatan pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 mencapai 4,71% dari total PDRB Provinsi Gorontalo. Nilai ini masih relatif rendah dan bila dibandingkan dengan kondisi baseline (2016), persentase ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2016 yang mencapai 5,29%.

Untuk indikator rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB di tahun 2019 mencapai 0,941%. Rendahnya nilai ini menunjukkan kontribusi pajak daerah yang masih sangat rendah dalam struktur ekonomi Provinsi Gorontalo. Jika dibandingkan dengan kondisi baseline (2016) yang hanya sebesar 0,885% menunjukkan adanya perbaikan penerimaan perpajakan daerah di tahun 2019.

Untuk indikator proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik pada tahun 2019 mencapai 19,97%. Nilai ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 yang sebesar 17,58%

Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

Target 17.6 memiliki 3 (tiga) indikator dan yang mencapai target pada tahun 2019 hanya 1 (satu) indikator yaitu Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK), untuk 2 (dua) indikator lainnya belum ditemukan data.

Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Target 17.19 terdapat 2 (dua) indikator dan kedua indikator tersebut telah memenuhi target capaian SDGs.

3.2. Upaya Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3.2.1. Pilar Sosial

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Juga diharapkan dapat menjalankan kebijakan, program dan kegiatan secara konsisten. Beberapa alternatif program dan kegiatan pada pilar pembangunan sosial yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo antara lain disajikan pada Tabel berikut.

No	Tujuan	Upaya Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs
1	Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	<div>1) memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah saat ini</div> <div>2) mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih sederhana, disamping terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan. Kejadian pandemi Covid-19 ini dapat menjadi titik awal bagi pemerintah untuk lebih serius melakukan pemutakhiran data penerima perlindungan sosial agar intervensi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran.</div> <div>3) mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan menjaga stabilitas biaya-biaya yang dikontrol pemerintah, seperti BBM, listrik, dan gas</div> <div>4) meningkatkan insentif bagi petani, peternak dan nelayan. Ditengah persebaran pandemi Covid-19, petani, peternak dan nelayan yang terus berproduksi dihadapkan pada kondisi minimnya serapan pasar.</div>
2	Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	<div>Permasalahan terkait kerawanan pangan kiranya dapat juga diminimalisir melalui program dan kegiatan lainnya, seperti:</div> <div>1) Fasilitasi kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional;</div> <div>2) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;</div> <div>3) Meningkatkan kerjasama Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat</div>

		<p>Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta <i>stakeholders</i> lainnya; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, salah satunya melalui fasilitasi UMKM; 5) Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan bahan baku dan produk pertanian sehingga mampu meningkatkan kemandirian berbasis kearifan lokal; 6) Regenerasi petani untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan, termasuk didalamnya mengubah pola pikir generasi muda terhadap pertanian; dan 7) Membangun pertanian yang lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar.
3	Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	<p>Sejumlah kebijakan yang relevan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pasca pandemiyang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan Germas (promotif dan preventif), meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, mencuci tangan dengan sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat dan pengelolaan limbah medis. 2) Penguatan <i>health security</i>, meliputi sistem peringatan dini (<i>alert system</i>), <i>surveillance</i> penyakit <i>real time</i>, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat. 3) Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes dan SDM kesehatan, meliputi pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan sistem rujukan, pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas, pemenuhan vaksin dan obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS), dukungan insentif bagi industry farmasi dan alkes dalam negeri.
4	Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	<p>Pemerintah perlu membuat kebijakan terbaiknya dalam menyikapi sejumlah tantangan nyata yang dihadapi dalam transformasi pendidikan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketimpangan teknologi antar sekolah dan antar wilayah dimana pada umumnya di wilayah perkotaan memiliki akses teknologi lebih baik dibandingkan dengan di wilayah pedesaan; 2) Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan, seperti internet dan kuota; dan 3) Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. 4) Pemerintah serta seluruh <i>stakeholder</i> dalam bidang pendidikan diharapkan mampu berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran agar peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan

		belajar untuk semua masyarakat tetap dapat tercapai, khususnya di masa darurat pandemi Covid-19 saat ini.
5	Pilar 5 : Kesenjangan Gender	1) Mendorong pelaksanaan program pengarusutamaan gender (PUG) yang dilaksanakan baik di level pusat maupun daerah. Pelaksanaan PUG diharapkan dapat meningkatkan capaian kesetaraan gender antarwilayah secara merata. 2)

3.2.2. Pilar Ekonomi

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Juga diharapkan dapat menjalankan kebijakan, program dan kegiatan secara konsisten.Beberapa alternatif program dan kegiatan pada pilar pembangunan sosial yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo antara lain disajikan pada Tabel berikut.

No	Tujuan	Upaya Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs
1	Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	1) Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan PLN terkait program pemasangan listrik ke daerah yang belum teraliri listrik. Selain itu program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga miskin sebaiknya lebih ditingkatkan 2) Untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebaiknya segera menindaklanjuti program yang digariskan dalam rencana umum energi daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi yang telag diidentifikasi. Untuk tujuan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta.
2	Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1) Untuk meningkatkan produktivitas pekerja dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan tematik bagi pekerja dan calon pekerja. 2) Meningkatkan efektivitas dari inovasi Brigade Alsintan yang digagas oleh pemerintah Provins Gorontalo 3) Melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi keselamatan kerja bagi pengusaha yang ada di Provinsi Gorontalo. Upaya ini dilakukan dengan bekerjasama dengan asosiasi terkait seperti APINDO, Dewan Pengupahan, dll

		4) Peningkatan lapangan kerja salah satunya melalui peningkatan investasi dengan melakukan perbaikan regulasi dalam perijinan agar
3	Tujuan 9 : Infrastruktur, Industri, dan Inovasi	<p>Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dalam PDRB perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong transformasi struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo 2) Insentif bagi pelaku industri seperti insentif pajak, permodalan dan fasilitasi pemasaran bagi produk-produk industri yang memiliki permintaan yang baik. 3) Regulasi yang berpihak kepada pelaku industri daerah terutama untuk aksesibilitas pemasaran diantaranya regulasi mengenai kewajiban retail modern untuk menerima produk industri lokal sebagai syarat penerbitan ijin usaha. 4) Mendorong penggunaan produk industri pengolahan daerah terutama dari IKM dalam program-program bantuan sosial yang bersumber dari APBD maupun APBN 5) Kerjasama dengan Forum CSR dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap industri kecil dan pengusaha pemula
4	Tujuan 10 : Mengurangi Ketimpangan	<p>Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat yang tersebar melalui pemanfaatan data terpadu yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran dari program pemberdayaan yang ada. 2) Koordinasi dengan OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota mengenai upaya peningkatan kapasitas aparat desa dalam hal pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peruntukan. Hal ini penting mengingat sumber kemiskinan terbesar di Provinsi Gorontalo berasal dari desa. 3) Penegakan regulasi terkait program sosial bagi tenaga kerja.
5	Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	<p>Upaya yang dapat dilakukan terkait kontribusi pendapatan daerah dalam ekonomi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi sumber pendapatan pajak daerah yang sudah ada sebelumnya 2) Pembenahan sistem dan mekanisme pengumpulan pajak daerah agar dapat

		meningkatkan jumlah pajak daerah yang diperoleh
		3) Kerjasama dengan pihak swasta dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah (SDA maupun non-SDA) dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan

3.2.3. Pilar Lingkungan

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Juga diharapkan dapat menjalankan kebijakan, program dan kegiatan secara konsisten.Beberapa alternatif program dan kegiatan pada pilar pembangunan lingkungan yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo antara lain disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. Alternatif Program dan Kegiatan pada Pilar Pembangunan Lingkungan

No	Nama Tujuan dalam TPB/SDGs	Nama Program / Kegiatan	Proses Pelaksanaan
1	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan, dan sektor industri termasuk penerapan prinsip 3R (reduce, reuse recycle) serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (<i>safe use of astewater in agriculture</i>)	Dukungan parapihak (pemerintah, NGO lokal, CSR/Lembaga donor Internasional, dan perguruan tinggi)
		Pengembangan agroekowisata (wisata khusus) di DAS prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola potensi SDA lokal berupa <i>processing</i> (industry pengolahan pangan), home stay, transportasi lokal, dan pemanfaatan air untuk usaha kemasan air mineral, dll - Melibatkan parapihak terkait
		Tujuannya untuk mempertahankan daerah tangkapan air yang ada, dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan	
		Penguatan kurikulum (muatan lokal) melalui agroekoeduwisata, untuk tujuan konservasi daerah tangkapan air.	

		Pengembangan dan peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan diversifikasi olahan pangan lokal berbasis komunitas	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi calon lokasi yang potensial melalui KPH dan NGO local- Penguatan kapasitas oleh pemerintah dan NGO local- Dukungan pendanaan dari pemerintah (pusat, daerah, desa) dan CSR/Lembaga donor Internasional
2	Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembentukan Kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>urban resilience</i>)▪ Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana▪ Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Sinergitas parapihak: DLHK, BPBD, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, komunitas lokal dan masyarakat
3	TUJUAN 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	<ul style="list-style-type: none">- Pemulihan pada lahan kritis dengan menerapkan sistem Agroforestri/kebun campur, teknik terasering pada lahan miring, dan agrosilvopastura (pertanian berkelanjutan)- Pemulihan kawasan konservasi Cagar Alam Tanjung Panjang dengan model silvofishery seluas 2.417,89 Ha (77,31%) yang sudah berubah fungsi menjadi tambak	<ul style="list-style-type: none">- Dukungan parapihak: BPDASHL, BKSDA, DLHK, BPKH, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, NGO dan masyarakat

3.2.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDG pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang bisa dilakukan di Provinsi Gorontalo antara lain sebagai berikut :

- Perlu untuk melakukan penguatan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum terakreditasi untuk segera melakukan pembenahan agar dapat segera masuk dalam kategori OBH yang terakredirasi oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Mensosialisasikan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin sekaligus peraturan gubernur tentang mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin
- Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada khalayak umum bahwa setiap warga yang sedang bermasalah hukum tetapi tidak mampu secara financial untuk menyelesaikan perkaranya dapat difasilitasi oleh pemerintah

melalui OBH untuk pendampingan kasus/perkasa baik litigasi maupun non litigasi.

- Penyesuaian organisasi perangkat daerah sesegera mungkin dilakukan mengingat masih terdapat OPD yang menyelenggarakan lebih dari 3 urusan pemerintahan. Selain itu terdapat beberapa OPD yang tidak efektif dalam penyelenggaraan fungsi ketika menyelenggarakan lebih dari satu urusan pemerintahan.
- Melakukan perbaikan, pembimbingan dan pengawalan intensif terhadap penyusunan Analisis Beban Kerja pada OPD yang masih tidak sesuai kebutuhan.
- Anggaran bantuan penyelesaian akhir studi dari Dinas Kesehatan akan direncanakan dan disusun dalam RKA pada awal tahun kegiatan dan disesuaikan dengan SSH sehingga anggaran kegiatan dapat terealisasi
- Perencanaan untuk melakukan Koordinasi terlebih dahulu dan menunggu persetujuan /rekomendasi dari KASN sebelum melakukan Seleksi Jabatan Struktural.
- Penambahan fasilitas penunjang sarana dan prasarana layanan pembinaan ASN dan Kedudukan Hukum
- Perlu dioptimalkan perencanaan dan penganggaran kegiatan yang bersifat pelayanan/urgent dan khusus kegiatan yang belum mencapai target akan dipacu pada tahun berikutnya agar target pada renstra dan renja tercapai.
- Kegiatan afirmatif untuk peningkatan kapasitas ASN perempuan dalam upaya meningkatkan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Berdasarkan evaluasi tahun 2019 diperoleh kesimpulan beberapa indikator mengalami peningkatan bahkan sebagian telah mencapai target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan yang ada.
- Jumlah indikator yang memiliki ketersediaan data masih cukup banyak sehingga kedepannya perlu diberikan perhatian serius mengenai kondisi dan kualitas data yang ada selama ini.

4.2 Rekomendasi

- Indikator-indikator yang belum terakomodir di dalam RPJMD 2017-2022, diupayakan bisa terakomodir kedalam RPJMD Provinsi Gorontalo kedepannya.
- Diperlukan sinergitas parapihak terutama instansi terkait (pemerintah provinsi, dan lembaga non pemerintah) dalam menyediakan data terkait program/kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target SDGs di Provinsi Gorontalo.
- Perlu merumuskan program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target SDGs, renstra dan RPJMD terutama kegiatan terkait sektor kehutanan dan lingkungan hidup, serta sektor kelautan dan perikanan.
- Perlu upaya keras untuk percepatan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.